



P U T U S A N
NOMOR 51/PID.TPK/ 2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana korupsi dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD RIDHO UMBARAN**
2. Tempat lahir : Wonosobo
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 20 November 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Bali Matraman RT.015 RW.003 Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wirausaha (Direktur Utama PT. Basista Teamwork);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024.
3. Perpanjangan PN, Sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024.
4. Penuntut umum, Sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024.
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 17 April 2024 s/d tanggal 15 Juni 2024;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;

Halaman 1 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
10. Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
11. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu NURUL LATIFAH,SH.,MH, ARIF FITRAWAN, S.H.,M.H., dan ANDI ARYA BATARA, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Hukum IFA & Rekan, beralamat di Komplek Ruko Latimojong Square Jl. Nico Blok H 26 Kel. Lariang Bangi, Kec. Makassar, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam register Nomor: 211/Pid.Tpk./2024/KB tanggal 23 April 2024 ;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam:

Primair:

Perbuatan Terdakwa MUHAMAD RIDHO UMBARAN , sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Perbuatan Terdakwa MUHAMAD RIDHO UMBARAN, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 27 Agustus 2024 Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 2 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS



Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Agustus 2024 Nomor 51/PID.TPK/2024/ PT. MKS, yang menunjuk Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 28 Agustus 2024 Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIDHO UMBARAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIDHO UMBARAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD RIDHO UMBARAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menjatuhkan pidana denda Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 4.009.100.580,- (empat milyar sembilan juta seratus ribu lima ratus delapan puluh Rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

Dokumen dari PT. Basista Teamwork :

1. Prosedur Perolehan Proyek P-PROYEK-01

Halaman 3 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Penerimaan Info Potensi Proyek

- 1) Surat Permintaan Penawaran dari PT. Basista Teamwork (BOQ, RKS dan Surat Undangan) No. ST/I-009A/II1/2019 Tanggal 13 September 2019.
- 2) Form FP-Proyek01-01 Form Kajian Resiko Tahap Pemasaran Tanggal 28 Agustus 2019.

B. Pertimbangan Menggunakan Mitra Bisnis

- 1) Form FP-Proyek01-02 Kajian Mitra Bisnis (tidak ada)

C. Proses Tender

- 1) Form FP-Proyek01-03 Form Pemeriksaan Tender Tanggal 23 September 2019.
- 2) Surat Balasan Permintaan Penawaran (PTSI) No. PH-013/SIMAK-IX/TY/2019 Tanggal 21 September 2019.
- 3) Undangan Negosiasi No. ST/BST/UN-010/IX/2019 Tanggal 23 September 2019.
- 4) Berita Acara Negosiasi No. ST/BST/BAN-010/IX/2019 Tanggal 25 September 2019.

D. Proses Kontrak

- 1) Permohonan Legal Review Draft Kontrak No. MEM- 006/SIMAK-X/TY/2019 Tanggal 14 Oktober 2019.
- 2) Hasil Legal Review Draft Kontrak No. MEM-052/SP-X/RSO/2019 Tanggal 17 Oktober 2019.
- 3) Form FP-Proyek01-04 Pemeriksaan isi Kontrak Tanggal 11 Oktober 2019.
- 4) SPK Kontrak Final Tanda tangan No. KP-099/BST-A8/X/JKT/2019.

2. Prosedur Persiapan Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-02

A. Pembentukan Tim/Penanggungjawab Proyek

- 1) Proyek FP-Proyek02-01 Surat Penunjukan Tim Tanggal 30 September 2019.
- 2) Notulen Tentang Ruang Lingkup Pekerjaan (tidak ada)
- 3) Proyek FP-Proyek02-02 Kriteria Tinjauan Ulang Kontrak Tanggal 28 Oktober 2019.
- 4) Notulen Rapat Pembahasan Awal Kontrak (tidak ada)

B. Kajian Resiko Proyek & K3LL

- 1) Proyek FP-Proyek02-03 Formulir Monitoring Mutu & K3LL Tanggal 30 September 2019



C. Pembuatan dan Persetujuan Rencana Anggaran dan Biaya Proyek (RAB Proyek)

- 1) Pembuatan Draft RAB Proyek dan Permohonan Persetujuan RAB Tanggal 07 November 2019 No. MEM-003/SIMAK-XI/TY/2019
- 2) Persetujuan Penandatanganan RAB Proyek tanggal 19 November 2019.

D. Penyiapan Sumber Daya Manusia

- 1) Penyiapan Sumber Daya Manusia (tidak ada)
- 2) Daftar Tenaga Yang dibutuhkan (tidak ada)
- 3) Proses Rekrutmen Tenaga Pelaksana

E. Penyusunan Prosedur Pelaksanaan Proyek

- 1) Penyusunan Prosedur Pelaksanaan Proyek yang telah disetujui (tidak ada)

F. Pembuatan Skedul Kerja

- 1) Pembuatan Skedul Kerja ditandatangani Kepala MP (tidak ada)
- 2) Kurva S (tidak ada)

G. Penyiapan Alat Operasi, Subkon dan Perlengkapan K3

- 1) Penyiapan Alat Operasi, Subcont (tidak ada)

H. Pelaksanaan Kickoff Meeting

I. Pelaksanaan Kickoff Meeting (tidak ada)

3. Prosedur Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-03

A. Pelaksanaan Proyek

- 1) Notulen Sosialisasi Tahapan Pekerjaan, Prosedur dan Skedul yang telah ditetapkan kepada seluruh pelaksana proyek (tidak ada)
- 2) Progress Kemajuan Proyek dalam ASMOP (tidak ada)
- 3) MK3LL Proyek atau MR melaksanakan Pengendalian Pemantauan Resiko Berdasarkan FORM FP-Proyek02-02 (tidak ada)

B. Pendanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan

- 1) Untuk Pendanaan Proyek mengikuti kebijakan dan Prosedur Anggaran (P-DKA-01) dari DKA (tidak ada).
- 2) Permohonan Droning November 2019 No. MEM-006/SIMAK-XI/TY/2019 Tanggal 18 November 2019.
- 3) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-051/SBINFRAS-XI/HW/2019 Tanggal 26 November 2019.
- 4) Permohonan Droning Desember 2019 No. MEM-016/SIMAK-XII/TY/2019 Tanggal 12 Desember 2019.



- 5) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-004/SBINFRAS-XII/HW/2019 Tanggal 19 Desember 2019.
- 6) Permohonan Dropping Januari 2020 No. MEM-094/SIMAK-I/TY/2020 Tanggal 22 Januari 2020.
- 7) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-263/SBINFRAS-I/HW/2020 Tanggal 27 Januari 2020.
- 8) Permohonan Dropping Maret 2020 No. MEM-093/SIMAK-III/TY/2020 Tanggal 13 Maret 2020.
- 9) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Maret 2020 No. ND-022/DKA-III/YS/2020 Tanggal 22 Maret 2020.
- 10) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Maret 2020 No. ND-001/SIMAK-IV/TY/2020 Tanggal 8 April 2020.
- 11) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Maret Tahap II No. ND-025/DKA-IV/YS/2020 Tanggal 16 April 2020.
- 12) Permohonan Dropping April 2020 No. MEM-041/SIMAK-IV/TY/2020 Tanggal 09 April 2020.
- 13) Permohonan Persetujuan Dropping Khusus Cabang Makassar Bulan April 2020 No. ND-006/DKA-V/YS/2020 Tanggal 06 Mei 2020.
- 14) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan April Tahap II No. ND-015/D KA-V/YS/2020 Tanggal 12 Mei 2020.
- 15) Permohonan Dropping Mei 2020 No. MEM-046/SIMAK-V/TY/2020 Tanggal 11 Mei 2020.
- 16) Permohonan Dropping Mei 2020 No. MEM-205/SBINFRAS-V/HW/2020 Tanggal 19 Mei 2020.
- 17) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Mei 2020 Tahap I No. ND-034/DKA-V/YS/2020 Tanggal 20 Mei 2020.
- 18) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Mei 2020 Tahap II No. ND-017/DKA-VI/YS/2020 Tanggal 09 Juni 2020.

Halaman 6 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19) Permohonan Dropping Juni 2020 No. MEM-144/SIMAK-VI/TY/2020 Tanggal 19 Juni 2020.
- 20) Permohonan Draping Mei 2020 No. MEM-323/SBINFRAS-VI/HW/2020 Tanggal 26 Juni 2020.
- 21) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Juni 2020 Tahap I No. ND-052/DKA-VI/YS/2020 Tanggal 30 Juni 2020.
- 22) Permohonan Draping Juli 2020 No. MEM-123/SIMAK-VII/TY/2020 Tanggal 17 Juli 2020.
- 23) Permohonan Draping Juli 2020 No. MEM-383/SBINFRAS-VII/HW/2020 Tanggal 20 Juli 2020.
- 24) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Juni 2020 Tahap I No. ND-047/DKA-VII/YS/2020 Tanggal 22 Juli 2020.
- 25) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Juli 2020 Tahap II No. ND-007/DKA-VIII/YS/2020 Tanggal 06 Agustus 2020.
- 26) Permohonan Dropping Agustus 2020 No. MEM-111/SIMAK-VIII/TY/2020 Tanggal 17 Agustus 2020.
- 27) Permohonan Draping Agustus 2020 No. MEM-273/SBINFRAS-VIII/HW/2020 Tanggal 19 Agustus 2020.
- 28) Permohonan Persetujuan Dropping Cab. Madya Makassar bulan Agustus 2020 Tahap I No. ND-036/DKA-VIII/YS/2020 Tanggal 25 Agustus 2020.
- 29) Permohonan Persetujuan Dropping Cab. Madya Makassar bulan Agustus 2020 Tahap II No. MD-034/DKA-IX/YS/2020 Tanggal 15 September 2020.
- 30) Permohonan Draping September 2020 No. ND-001/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 21 September 2020.
- 31) Permohonan Draping September 2020 No. MEM-080/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 11 September 2020.
- 32) Permohonan Draping September 2020 No. MEM-151/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 21 September 2020.
- 33) Permohonan Draping September 2020 No. MEM-451/SBINFRAS-IX/HW/2020 Tanggal 23 September 2020.



- 34) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan September 2020 Tahap I No. ND-001/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 21 September 2020.
- 35) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan September 2020 Tahap I No. ND-059/DKA-IX/YS/2020 Tanggal 23 September 2020.
- 36) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan September 2020 Tahap 2 NO. ND-018/DKA-X/YS/2020 Tanggal 12 Oktober 2020.
- 37) Permohonan Dropping Oktober 2020 No. MEM-036/SIMAK-X/TY/2020 Tanggal 6 Oktober 2020.
- 38) Permohonan Dropping Oktober 2020 No. MEM-159/SIMAK-X/TY/2020 Tanggal 21 Oktober 2020.
- 39) Permohonan Dropping Oktober 2020 No. MEM-306/SBINFRAS-X/HW Tanggal 19 Oktober 2020/2020.
- 40) Permohonan Persetujuan Dropping Cab. Madya Makassar bulan Oktober 2020 Tahap I No. ND-036/DKA-X/YS/2020 Tanggal 06 Oktober 2020.
- 41) Permohonan Dropping November 2020 No. MEM-097/SIMAK-XI/TY/2020 Tanggal 13 November 2020.
- 42) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Oktober 2020 Tahap II No. ND-027/DKA-XI/YS/2020 tanggal 16 Nov. 2020.
- 43) Permohonan Persetujuan Dropping Cab. Madya Makassar bulan November 2020 Tahap I No. ND-046/DKA-XI/YS/2020 tanggal 25 Nov. 2020.
- 44) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan November 2020 Tahap II No. ND-025/DKA-XII/YS/2020 Tanggal 11 Desember 2020.
- 45) Daftar Uang Muka Operasional, Pengajuan dan PJUM
- 46) List Pengajuan Uang Muka
- 47) Daftar Penggajian Personil
- 48) List Penggajian Personil
- 49) List Penyewaan
- 50) List Peyewaan
- 51) List Perjalanan Dinas
- 52) List Perjalanan Dinas

Halaman 8 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Pemantauan Kemajuan Proyek

- 1) MK3LL Proyek atau MR melaksanakan Pengendalian Pemantauan Resiko Memastikan Para Pelaksana dan Subcon menjalankan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan IK (tidak ada)
- 2) Monitoring Progress Kemajuan Proyek dalam ASMOP (tidak ada)

D. Pemantauan Pengendalian Resiko sesuai dengan Matriks Respon Resiko

- 1) Pengendali MK3LL memantau resiko (tidak ada)

E. Pembuatan Laporan Hasil Pekerjaan

- 1) Laporan Tahap 1 (tidak ada)
- 2) Laporan Tahap 2 (tidak ada)
- 3) Laporan Tahap 3 (tidak ada)
- 4) Laporan Tahap 4 (tidak ada)

F. Penyerahan Laporan dan Berita Acara Serah Terima

- 1) BAPP Tahap 1 No.BAPP 006/SIMAK-III/TY/2020 Tanggal 11 Maret 2020
- 2) BAPP Tahap 2 No.BAPP 029/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 29 September 2020.
- 3) BAPP Tahap 3 No. BAPP 175/SIMAK-XII/TY/2021 Tanggal 06 Desember 2021

G. Pembuatan Invoice

- 1) Admin Membuat PPI sesuai dengan Prosedur Keuangan (PDKA-04)
 - a. Surat permohonan pembayaran termin 1 No. SRT-081/SIMAK-XI/TY/2020 Tanggal 30 November 2020 dan PPI dan Invoice Tahap 1 No. INV-0243/MK-11/TY/20 Tanggal 30 November 2020
 - b. Surat permohonan pembayaran termin 2 No. SRT-026/SIMAK-III/TY/2019 Tanggal 31 Maret 2021 dan PPI dan Invoice Tahap 2 No. INV-0087/MK-03-TY/21 Tanggal 31 Maret 2021
 - c. Surat permohonan pembayaran termin 3 No. SRT-013/SIMAK-VII/HSY/2022 Tanggal 29 Juli 2022 dan PPI dan Invoice Tahap 3 No. INV-1411/MK-07-HS/22 Tanggal 29 Juli 2022
 - d. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1-1 No. SRT-015/SIMAK-VI/TY/2020 Tanggal 24 Juni 2020
 - e. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1-2 No. SRT-062/SIMAK-III/TY/2021 Tanggal 31 Maret 2021



f. Surat Teguran SRT-050/SIMAK-IV/TY/2021 Tanggal 26 April 2021

g. Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar & Cek

H. Pengakhiran Proyek

Dokumen dari PT Cahaya Sakti :

4. Prosedur Perolehan Proyek P-PROYEK-01

A. Penerimaan Info Potensi Proyek

- 1) Surat Permintaan Penawaran dari PT Cahaya Sakti No. 0708/adm A/II/19 Tanggal 29 Juli 2019 (Scan)
- 2) Form FP-Proyek01-01 Kajian Resiko Tahap Pemasaran Tanggal 12 Agustus 2019

B. Pertimbangan Menggunakan Mitra Bisnis

- 1) Form FP-Proyek01-02 Kajian Mitra Bisnis (tidak ada)

C. Proses Tender

- 1) Form FP-Proyek01-03 Form Pemeriksaan Tender (tidak ada)
- 2) Surat Balasan Penawaran (PTSI) No. PH-003/SIMAK-VIII/TY/2019 Tanggal 05 Agustus 2019
- 3) Surat Konfirmasi Penawaran (PT Cahaya Sakti) No. 0709/adm/CS-SI/VIII/2019 Tanggal 07 Agustus 2019

D. Proses Kontrak

- 1) Permohonan Legal Review Draft Kontrak No. MEM- 003/S1MAKA/III/TY/2019 Tanggal 12 Agustus 2019
- 2) Hasil Legal Review Draft Kontrak No. MEM-046/SP-VIII/MOD/2019 Tanggal 15 Agustus 2019
- 3) Form FP-Proyek01-04 Pemeriksaan isi Kontrak (tidak ada)
- 4) SPK Kontrak Final Tanda tangan No. PERJ-001/SIMAK-VIII/TY/2019 Tanggal 02 Agustus 2019

5. Prosedur Persiapan Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-02

A. Pembentukan Tim/Penanggungjawab Proyek

- 1) Proyek FP-Proyek02-01 Surat Penunjukan Tim (tidak ada)
- 2) Notulen Tentang Ruang Lingkup Pekerjaan (tidak ada)
- 3) Proyek FP-Proyek02-02 Kriteria Tinjauan Ulang Kontrak Tanggal 29 Agustus 2019
- 4) Notulen Rapat Pembahasan Awal Kontrak (tidak ada)

B. Kajian Resiko Proyek & K3LL

- 1) Proyek FP-Proyek02-03 Formulir Monitoring Mutu & K3LL (tidak ada)

Halaman 10 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS



C. Pembuatan dan Persetujuan Rencana Anggaran dan Biaya Proyek (RAB Proyek)

- 1) Pembuatan Draft RAB Proyek dan Permohonan Persetujuan RAB No. MEM-002/SIMAK-IX/TY/2019 Tanggal 04 September 2019
- 2) Persetujuan Penandatanganan RAB Proyek Tanggal 16 Mei 2019 (tidak ada)

D. Penyiapan Sumber Daya Manusia

- 1) Perjanjian Kerja Personil Proyek

E. Penyusunan Prosedur Pelaksanaan Proyek

- 1) Penyusunan Prosedur Pelaksanaan Proyek yang telah disetujui

F. Pembuatan Skedul Kerja

- 1) Pembuatan Skedul Kerja ditandatangani Kepala MP (tidak ada)
- 2) Kurva S (tidak ada)

G. Penyiapan Alat Operasi, Subkon dan Perlengkapan K3

- 1) Penyiapan Alat Operasi, Subcon (tidak ada)

H. Pelaksanaan Kickoff Meeting

- 1) Pelaksanaan Kickoff Meeting (tidak ada)

6. Prosedur Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-03

A. Pelaksanaan Proyek

- 1) Notulen Sosialisasi Tahapan Pekerjaan, Prosedur dan Skedul yang telah ditetapkan kepada seluruh pelaksana proyek (tidak ada)
- 2) Progress Kemajuan Proyek dalam ASMOP (tidak ada)
- 3) MK3LL Proyek atau MR melaksanakan Pengendalian Pemantauan Resiko Berdasarkan FORM FP-Proyek02-02 (tidak ada)

B. Pendanaan dan Pertanggung Jawaban Penggunaan

- 1) Untuk Pendanaan Proyek mengikuti kebijakan dan Prosedur Anggaran (P-DKA-01) dari DKA (tidak ada)
- 2) Permohonan Draping Agustus 2019 No. MEM-014/SIMAK-VIII/TY/2019 Tanggal 20 Agustus 2019
- 3) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-014/SBINFRAS-VIII/HU/2019 Tanggal 23 Agustus 2019 (tidak ada)
- 4) Permohonan Draping Khusus No. ND-017/SIMAK-IX/TY/2019 Tanggal 06 September 2019



- 5) Permohonan Draping September 2019 No. MEM-008/SIMAK-IX/TY/2019 Tanggal 20 September 2019
- 6) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana oleh Cab. Makassar No. MEM-014/SBINFRAS-IX/HW/2019 Tanggal 23 September 2019
- 7) Permohonan Draping Oktober 2019 No. MEM-009/SIMAK-X/TY/2019 Tanggal 21 Oktober 2019
- 8) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-010/SBINFRS-X/HW/2019 Tanggal 24 Oktober 2019
- 9) Permohonan Draping Desember 2019 NO. MEM-016/SIMAK-XII/TY/2019 Tanggal 12 Desember 2019
- 10) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana oleh Cab. Makassar No. MEM-004/SBINFRAS-XII/HU/2019 Tanggal 19 Desember 2019
- 11) Permohonan Draping Januari 2020 No. MEM-094/SIMAK-I/TY/2020 Tanggal 22 Januari 2020
- 12) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-263/SBINFRAS-I/HW/2020 Tanggal 27 Januari 2020
- 13) Permohonan Draping Maret 2020 No. MEM-093/SIMAK-III/TY/2020 Tanggal 13 Maret 2020
- 14) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Maret 2020 No. ND-022/DKA-III/YS/2020 Tanggal 22 Maret 2020
- 15) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Maret Tahap II No. ND-025/DKA-IV/YS/2020 Tanggal 16 April 2020
- 16) Permohonan Draping April 2020 No MEM-041/SIMA IV/TY/2020 Tanggal 09 April 2020
- 17) Permohonan Persetujuan Dropping Khusus Cabang Makassar Bulan April 2020 No. ND-006/DKA-V/YS/2020 Tanggal 06 Mei 2020
- 18) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan April Tahap II ND-015/DKA-V/YS/2020 Tanggal 12 Mei 2020

Halaman 12 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19) Permohonan Draping Mei 2020 No. MEM-046/SIMAK-VI/ TY/2020 Tanggal 11 Mei 2020
- 20) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Mei 2020 Tahap I No. ND-034/DKA-V/YS/2020 Tanggal 20 Mei 2020
- 21) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Mei 2020 Tahap II No. ND-017/DKA-VI/YS/2020 Tanggal 09 Juni 2020
- 22) Permohonan Draping Juni 2020 No. MEM-144/SIMAK-VII/ TY/2020 Tanggal 19 Juni 2020
- 23) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Juni 2020 Tahap I No. ND-052/DKA-VI/YS/2020 Tanggal 30 Juni 2020
- 24) Permohonan Draping Juli 2020 No. MEM-123/SIMAK-VIII/ TY/2020 Tanggal 17 Juli 2020
- 25) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Juni 2020 Tahap I No. ND-047/DKA-VII/YS/2020 Tanggal 22 Juli 2020
- 26) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Juli 2020 Tahap II No. ND-007/DKA-VIII/YS/2020 Tanggal 06 Agustus 2020
- 27) Permohonan Dropping Agustus 2020 No. MEM-111/SIMAK-VIII/ TY/2020 Tanggal 17 Agustus 2020
- 28) Permohonan Persetujuan Dropping Cab. Madya Makassar bulan Agustus 2020 Tahap I No. ND-036/DKA-VIII/YS/2020 tanggal 25 Agustus 2020
- 29) Permohonan Persetujuan Dropping Cab. Madya Makassar bulan Agustus 2020 Tahap II No. ND-034/DKA-IX/YS/2020 Tanggal 15 September 2020
- 30) Permohonan Dropping September 2020 No. MEM-151/SIMAK-IX/ TY/2020 Tanggal 21 September 2020
- 31) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan September 2020 Tahap I No. ND-059/DKA-IX/YS/2020 Tanggal 23 September 2020
- 32) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar bulan September 2020 Tahap 2 No. ND-018/DKA-X/YS/2020 tanggal 12 Oktober 2020

Halaman 13 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 33) Daftar Uang Muka Operasional, Pengajuan dan PJUM
- 34) List Pengajuan Uang Muka
- 35) Daftar Penggajian Personil
- 36) List Penggajian Personil
- 37) Daftar Penyewaan kendaraan
- 37) List Penyewaan
- 38) Daftar Perjalanan Dinas
- 39) List Perjalanan Dinas

C. Pemantauan Kemajuan Proyek

- 1) MK3LL Proyek atau MR melaksanakan Pengendalian Pemantauan Resiko Memastikan Para Pelaksana dan Subcon menjalankan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan IK (tidak ada)
- 2) Monitoring Progress Kemajuan Proyek dalam ASMOP (tidak ada)
- 3) Pengendali MK3LL Memantau Resiko (tidak ada)

D. Pembuatan Laporan Hasil Kerja

- 1) Laporan Tahap 1 (tidak ada)
- 2) Laporan Tahap 2 (tidak ada)
- 3) Laporan Tahap 3 (tidak ada)
- 4) Laporan Tahap 4 ((tidak ada)

E. Penyerahan Laporan dan Berita Acara Serah Terima

- 1) BAP P Tahap 1 No. BAPP-053/SIMAK-XII/TY/2019 Tanggal 13 Des 2019
- 2) BAP P Tahap 2 No. BAPP-002/SIMAK-IirTY/2020 Tanggal 21 Feb. 2020
- 3) BAPP Tahap 3 No. BAPP-019/SIMAK-III/TY/2020 Tanggal 20 Maret 2020
- 4) BAPP Tahap 4 No. BAPP-013/SIMAK-V/TY/2020 Tanggal 28 Mei 2020

F. Pembuatan Invoice

- 1) Admin Membuat PPI sesuai dengan Prosedur Keuangan (P-DKA-04)
 - a. PPI dan Invoice Tahap 1, Surat Permohonan Pembayaran Termin I No.SRT-059/SIMAK-XII/TY/2019 Tanggal 17 Desember 2019 dan Invoice Tahap 1 No. INV-0213/MK-12/TY/19 Tanggal 17 Desember 2019



- b. PPI dan Invoice Tahap 2, Surat Permohonan Pembayaran Termin II No.SRT-030/SIMAK-II/TY/2020 Tanggal 25 Februari 2020 dan Invoice Tahap II No. INV-0029/MK-02/TY/20 Tanggal 25 Februari 2020
- c. PPI dan Invoice Tahap 3, Surat Permohonan Pembayaran Termin III No.SRT-082/SIMAK-XI/TY/2020 Tanggal 30 November 2020 dan Invoice Tahap III No. INV-0244/MK-11/TY/20 Tanggal 30 November 2020
- d. PPI dan Invoice Tahap 4, Surat Permohonan Pembayaran Termin IV No. SRT-083/SIMAK-XI/TY/2020 tanggal 30 November 2020 dan Invoice Tahap IV No. INV-0245/MK-11/TY/20 tanggal 30 November 2020
- e. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1 - 1 No. SRT-044/SIMAK-III/TY/2020 Tanggal 12 Maret 2020
- f. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1 - 2 No. SRT-015/SIMAK-VI/TY/2020 Tanggal 03 Juni 2020
- g. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 2 - 1 No. SRT-014/SIMAK-VI/TY/2020 Tanggal 03 Juni 2020
- h. Konfirmasi Pembayaran Cahaya Sakti No. 25-CSA/II/2020 Tanggal 30 Juni 2020
- i. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 2 - 2 No. SRT-029/SIMAK-VIII/TY/2020 Tanggal 26 Agustus 2020
- j. Kesanggupan bayar Cahaya Sakti No. 016/ADM-SKP/ CS/ XII/2020 Tanggal 07 Desember 2020
- k. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 3 - 1 No. SRT-060/SIMAK-III/TY/2021 Tanggal 31 Maret 2021
- l. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 4 - 1 No. SRT-061/SIMAK-III/TY/2021 Tanggal 31 Maret 2021
- m. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 3 - 2 No. SRT-048/SIMAK-IV/TY/2021 Tanggal 26 April 2021
- n. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 4 -2 No. SRT-049/SIMAK-IV/TY/2021 Tanggal 26 April 2021
- o. Surat Teguran Piutang Invoice Tahap 1 No. SRT-053/SIMAK-IV/TY/2021 Tanggal 26 April 2021
- p. Surat Teguran Piutang Invoice Tahap 2 No. SRT-054/SIMAK-IV/TY/2021 Tanggal 26 April 2021

Halaman 15 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



q. Undangan Rapat PT Cahaya Sakti - Penjelasan Pembayaran
No. SRT-041 /SIMAK-VII I/TY/2021 Tanggal 23 Agustus 2021

r. Surat pemberitahuan reschedule rapat No. 032/SPI/CSA/ III/
2021 Tanggal 27 Agustus 2021

G. Pengakhiran Proyek

Dokumen dari PT. INOVASI GLOBAL (WILAYAH MAKASSAR)

7. Prosedur Perolehan Proyek P-PROYEK-01

A. Penerimaan Info Potensi Proyek

- 1) Surat Permintaan Penawaran dari PT IGS Makassar (BOQ, RKS dan Surat Undangan) No. 002/IGS.SK-SP/IGS/19-VI Tanggal 18 November 2019

B. Proses Tender

- 1) Surat Balasan Penawaran (PTSI) No. PH-004/SIMAK-XI/TY/2019

C. Proses Kontrak

- 1) SPK Kontrak Final Tanda tangan No. 001/IGS.SK-K.SPK/19-XI

8. Prosedur Persiapan Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-02

A. Pembuatan dan Persetujuan Rencana Anggaran dan Biaya Proyek (RAB Proyek)

- 1) RAB

B. Penyiapan Sumber Daya Manusia

- 1) Form CV

9. Prosedur Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-03

A. Pendanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan

- 1) Uang Muka Operasional, Pengajuan dan PJUM
- 2) List Pengajuan Uang Muka
- 3) Penggajian Personil
- 4) List Penggajian Personil

B. Penyerahan Laporan dan Berita Acara Serah Terima

- 1) BAPP Tanggal 30 Januari 2020

C. Pembuatan Invoice

- 1) Admin Membuat PPI sesuai dengan Prosedur Keuangan (P-DKA-04) - PPI dan Invoice No. SRT-23/SIMAK-III/TY/2020 Tanggal 19 Maret 2020

Dokumen dari PT. INOVASI GLOBAL (WILAYAH JAKARTA)

10. Prosedur Perolehan Proyek P-PROYEK-01

A. Penerimaan Info Potensi Proyek



- 1) Surat Permintaan Penawaran dari PT Inovasi Global Solusindo No.004/IGS.SK-SP/IGS/19-III Tanggal 12 Maret 2019 (Scan)
- 2) Form FP-Proyek01-01 Kajian Resiko Tahap Pemasaran Tanggal 24 April 2019

B. Pertimbangan Menggunakan Mitra Bisnis

- 1) Form FP-Proyek01-02 Kajian Mitra Bisnis Tanggal 26 Maret 2019

C. Proses Tender

- 1) Form FP-Proyek01-03 Form Pemeriksaan Tender Tanggal 25 April 2019
- 2) Surat Balasan Permintaan Penawaran (PTSI) No. SRT-091/SIMAK-III/TY/2019 Tanggal 21 Maret 2019
- 3) Surat Balasan Permintaan Penawaran (PTIGS) Negosiasi No. 004/IGS.SK-SP.01/IGS/19-III Tanggal 22 Maret 2019
- 4) Surat Konfirmasi Negosiasi (PTSI) No. SRT-108/SIMAK-III/TY/2019 Tanggal 26 Maret 2019

D. Proses Kontrak

- 1) Hasil Legal Review Draft Kontrak No. MEM- 073 /SP-IV/ MOD/ 2019 Tanggal 23 April 2019
- 2) Surat Balasan Penawaran No. 004/IGS-SK-SP.02/IGS/19-111 tanggal 27 Maret 2019
- 3) Form FP-Proyek01-04 Pemeriksaan isi Kontrak Tanggal 24 April 2019
- 4) SPK Kontrak Final Tanda tangan No. 003/IGS.SK-SP.02/IGS/19-III

11. Prosedur Persiapan Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-02

A. Pembentukan Tim/Penanggungjawab Proyek

- 1) Proyek FP-Proyek02-01 Surat Penunjukan Tim Tanggal 24 April 2019
- 2) Proyek FP-Proyek02-02 Kriteria Tinjauan Ulang Kontrak 24 April 2019

B. Kajian Resiko Proyek & K3LL

- 1) Proyek FP-Proyek02-03 Formulir Monitoring Mutu & K3LL 25 April 2019

C. Pembuatan dan Persetujuan Rencana Anggaran dan Biaya Proyek (RAB Proyek)

- 1) Pembuatan Draft RAB Proyek dan Permohonan Persetujuan RAB Tanggal 26 April 2019 No. MEM-012/SIMAK-IV/TY/2019

Halaman 17 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Persetujuan Penandatanganan RAB Proyek Tanggal 16 Mei 2019

D. Penyiapan Sumber Daya Manusia

1) Kontrak Personil Proyek

12. Prosedur Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-03

A. Pendanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan

1) Untuk Pendanaan Proyek mengikuti kebijakan dan Prosedur Anggaran (P-DKA-01) dari DKA

a. Permohonan Droning Mei 2019 No. MEM-009/SIMAK-V/ TY/ 2019 Tanggal 15 Mei 2019

b. Permohonan Droning Khusus No. ND-046/SIMAK-V/TY/2019 Tanggal 15 Mei 2019

c. Rekomendasi atas Permohonan Droning Dana oleh Cab Makassar No. MEM-004.SBINFRAS.V.HW.2019 Rekomendasi Droning 16 Mei 2019

d. Permohonan Droning Juni 2019 MEM-005.SIMAK-VI. TY. 2019 Permohonan Droning 25 Juni 2019

e. Rekomendasi atas Permohonan Droning Dana Oleh Cabang Makassar MEM – 006 . SBINFRAS. VI. HW. 2019 Rekomendasi Droning 28 Juni 2019

f. Permohonan Droning Juli 2019 No. MEM-012.SIMAK-VII. TY.2019 Permohonan Droning 23 Juli 2019

g. Rekomendasi atas Permohonan Droning Dana Oleh Cabang Makassar MEM - 007.SBINFRAS.VII.HW.2019 Rekomendasi Droning 23 Juli 2019

h. Permohonan Droning Agustus 2019 No. MEM-014.SIMAK-VIII.TY.2019 Permohonan Droning 20 Agustus 2019

i. Permohonan Droning Agustus 2019 MEM-014.SBINFRAS. VIII. HU.2019 Rekomendasi Droning 23 Agustus 2019

j. Permohonan Droning September 2019 MEM-008.SIMAK-IX.TY.201 Permohonan Droning 20 September 2019

k. Rekomendasi atas Permohonan Droning Dana Oleh Cabang Makassar MEM - 014. SBINFRAS. IX. HW. 2019 Rekomendasi Droning 23 September 2019

l. Permohonan Droning Oktober 2019 No. MEM-009.SIMAK-X.TY.2019 Permohonan Droning 21 Oktober 2019

Halaman 18 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m. Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-010.SBINFRAS.X.HW.2019 Rekomendasi Dropping 24 Oktober 2019
- n. Permohonan Dropping Desember 2019 MEM-016.SIMAK-XII.TY.2019 Permohonan Dropping 12 Desember 2019
- o. Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-004.SBINFRAS.XII.HU.2019 Rekomendasi Dropping 19 Desember 2019
- p. Permohonan Dropping Januari 2020 eOffice-MEM-094.SIMAK-I.TY.2020 Permohonan Dropping 22 Januari 2020
- q. Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar MEM - 263.SBINFRAS-I.HW.2020 Rekomendasi Dropping 27 Januari 2020.
- r. Uang Muka Operasional, Pengajuan dan PJUM
- s. List Pengajuan Uang Muka
- t. Penggajian Personil dan Uang Makan
- u. List Penggajian Personil
- v. Daftar Penyewaan kendaraan
- w. Daftar Pengajuan Perjalanan Dinas

B. Penyerahan Laporan dan Berita Acara Serah Terima

- 1) BAPP Tahap 1 No. BAPP.018/SIMAK-VI/TY/2019 Tanggal 26 Juni 2019
- 2) BAPP Tahap 2 No. BAPP.018/SIMAK-VI/TY/2019 Tanggal 26 Juni 2019
- 3) BAPP Tahap 3 No. BAPP.087/SIMAK-IX/TY/2019 Tanggal 30 Sept. 2019

C. Pembuatan Invoice

- 1) Admin Membuat PPI sesuai dengan Prosedur Keuangan (P-DKA-04)
 - a. Surat permohonan pembayaran termin 1 No. SRT-003/SIMAK-VIII/TY/2019 Tanggal 05 Agustus 2019 dan PPI dan Invoice Tahap 1 No. INV-0091/MK-08/TY/19 Tanggal 02 Agustus 2019
 - b. Surat permohonan pembayaran termin 2 No. SRT-027/SIMAK-X/TY/2019 Tanggal 09 Oktober 2019 dan PPI dan

Halaman 19 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Invoice Tahap 2 No. INV-0131/MK-10-TY/19 Tanggal 07 Oktober 2019

- c. Surat permohonan pembayaran termin 3 No. SRT-033/SIMAK-IV/TY/2020 Tanggal 30 April 2020 dan PPI dan Invoice Tahap 3 No. INV-0078/MK-04-TY/20 Tanggal 30 April 2020
- d. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1-1 No. SRT-036/SIMAK-IX/TY/2019 Tanggal 24 September 2019
- e. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1-2 No. SRT-037/SIMAK-I/TY/2019 Tanggal 31 Januari 2020
- f. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 2-1 No. SRT-067/SIMAK-I/TY/2020 Tanggal 31 Januari 2020
- g. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 2-2 No. SRT-016/SIMAK-VI/TY/2020 Tanggal 03 Juni 2020
- h. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 3-1 No. SRT-096/SIMAK-VIII/TY/2020 Tanggal 26 Agustus 2020
- i. Surat Teguran Invoice Tahap 1 SRT-040/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 15 September 2020
- j. Surat Teguran Invoice Tahap 2 SRT-041/SIMAK-IX/ TY/2020 Tanggal 25 September 2020
- k. Surat Konfirmasi Semua Piutang SRT-080/SIMAK-XII/ TY/2020 Tanggal 22 Desember 2020
- l. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 3 - 2 No. SRT-067/SIMAK-III/TY/2021 Tanggal 31 Maret 2021
- m. Surat Teguran Invoice Tahap 3 No. SRT-051/SIMAK-IV/TY/2021 Tanggal 26 April 2021

13. Kartu ATM Tenaga Operasional Proyek Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin pembangkit Listrik Tenaga Gas PLTG 4 X 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara PT Cahaya Sakti, sebagai berikut:

- 1) ATM an. Bella Regita Nomor: 5221 8421 2193 7111.
- 2) ATM an. Ikram Hadi M Nomor: 5221 8421 2240 4087.
- 3) ATM an. A. Nurfibriani Nomor: 5221 8421 2193 7483.
- 4) ATM an. A. Ilham Nomor: 5221 8421 2240 4210.
- 5) ATM an. Rahmatiah Danah Nomor: 5221 8421 2193 7129.

Halaman 20 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) ATM an. Ryo Ayatullah Nomor: 5221 8421 2193 7517.
- 7) ATM an. Wahyu Saputra Nomor: 5221 8421 2193 7491.
- 8) ATM an. Abd. Rahman Nomor: 5221 8421 0976 6532.
- 9) ATM an. Irwan Nomor: 5221 8421 2240 4061.
- 10) ATM an. Ryan Santoso Nomor: 5221 8421 2193 7426.
- 11) ATM an. M. Sucitra A Nomor: 5221 8421 2193 7418.
- 12) ATM an. Pangeran S Nomor: 5221 8421 2193 7103.
- 13) ATM an. Nadiah W Nomor: 5221 8421 2193 7137.
- 14) ATM an. M. Resky S Nomor: 5221 8421 2193 7467.
- 15) ATM an. Andi Babara Nomor: 5221 8421 2193 7459.
- 16) ATM an. Warsa H Nomor: 5221 8421 2240 4079.
- 17) ATM an. Sri Rahayu Nomor: 5221 8421 2240 4053.
- 18) ATM an. Dwi Rachma A Nomor: 5221 8421 2193 7350.
- 19) ATM an. Abd. Rahman Nomor: 5221 8421 2193 7434.
- 20) ATM an. Agung Januar Nomor: 5221 8421 2193 7525.
- 21) ATM an. Rahmat Wardana Nomor: 5221 8421 0988 9615.
- 22) ATM an. Ahmad Erwin Nomor: 5221 8421 2193 7442.
- 23) ATM an. Dwi Hartini Nomor: 5221 8421 2193 7509.
- 24) ATM an. Nasrul R N Nomor: 5221 8421 2240 4046.
- 25) Rekening Koran Bank BCA an. Agus Ibrahim Nomor Rekening: 5040187253 Bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, , Agustus, September, Oktober, November, Desember 2019, Januari, Februari, Maret 2020.
- 26) Rekening Koran Bank BRI an. Yuni Omega Tanga Nomor Rekening :341901012162503 Bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2021, Januari, Februari, Maret 2022.
- 27) Rekening Koran Bank BRI an. Yuni Omega Tanga Nomor Rekening :040301067206508 Bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2021, Januari, Februari, Maret 2022.
- 28) Rekening Koran Bank an. Edy Darmawan Nomor Rekening 040301008981535 Bulan Oktober, November, Desember 2019, Januari, Februari, Maret 2020.
- 29) Rekening Koran Bank Danamon Indonesia an. Try Yulianto Nomor Rekening: 00362553685 Bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2020, Tahun 2021, Januari, Februari, maret 2022.

Halaman 21 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 30) Rekening Koran Bank Mandiri an. Tri Yulianto Nomor Rekening: 1420002293214 Bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2019, Tahun 2020, Tahun 2021.
- 31) Rekening Koran Bank BRI an. Padi Fadillah Nomor Rekening: 039001012943500, Bulan September, Oktober, November, Desember 2020, Januari, Februari, Maret 2021.
- 32) Rekening Koran Bank Mandiri an. Padi Fadillah Nomor Rekening: 700041019709 Bulan September, Oktober, November, Desember 2020, Januari, Februari, Maret 2021.
- 33) Rekening Koran Bank BCA an. Achmad Tauhid Latif Nomor Rekening: 7890625082 Bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2021.
- 34) Rekening Koran Bank BRI an. Achmad Tauhid Latif Nomor Rekening: 034301045169504 Bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, Januari, Februari, Maret 2022.
- 35) Rekening Koran Bank BCA an. Achmad Tauhid Latif Nomor Rekening : 7890625082 Bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2019, Tahun 2020, Tahun 2021.
14. Capture Email dan Wa PT. Basista Teamwork.
15. Capture Email dan Wa PT. Cahaya Sakti.
16. Capture Email dan WA PT. Inovasi Global Solusindo.
17. 1 lembar cek kosong dari Tri Yulianto kepada Hermawati dari PT Cahaya Sakti untuk pembayaran jasa terkait Proyek Pekerjaan Jasa Konsultasi penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Listrik Tenaga Gas PLTG 4 X 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara PT Cahaya Sakti.
18. Surat Keputusan Direksi PT Surveyor Indonesia SKD-008/DRU-VIII/DSDM/2018 tanggal 26 Juli 2018 tentang Mutasi dan Promosi Saudara Tri Yulianto.
19. Akta Notaris Nomor 11 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Pencabutan dan Pengangkatan Pimpinan Serta Tugas, Wewenang dan Kuasa Kepala Cabang Madya Makassar.



20. Surat Keputusan Direksi PT Surveyor Indonesia (Persero) Nomor: SKD-003/DRU-IV/DHC/2020 tanggal 28 april 2020 tentang Definitif Saudara TriYulianto.
21. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Surveyor Indonesia (Persero) Nomor :029 tanggal 28 Juni 2011.
22. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Pernyataan atas nama Tri Yulianto tanggal 8 April 2022.
23. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Pernyataan atas nama Asmara Hady tanggal 8 April 2022.
24. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Pernyataan atas nama Achmad Tauhid Latieftanggal 8 April 2022.
25. 1 (satu) Lembar daftar Dropping dana proyek PT. Basista Teamwork.
26. 1 (satu) lembar Daftar Dropping dana proyek PT.Cahaya Sakti.
27. 1 (satu) lembar daftar Dropping dana proyek PT. Inovasi Global Solusindo Makassar.
28. 1 (satu) lembar daftar dropping dana proyek PT. Inovasi Global Solusindo Jakarta.

PT. Basista Teamwork

(Disita dari Agung Pambudi)

29. Rekening Koran Bank BCA an. Agung Pambudi Nomor Rekening : 8803999994 Tahun 2019.
30. Rekening Koran Bank BCA an. Agung Pambudi Nomor Rekening: 8803999994 Tahun2020.
31. Rekening Koran Bank BCA an. Agung Pambudi Nomor Rekening: 8803999994 Tahun 2021.
32. Rekening koran Bank BRI an. Inovasi Global Solusindo Nomor Rekening :117301000251304 bulan November dan Desember Tahun 2019.
33. Rekening koran Bank BRI an. Inovasi Global Solusindo Nomor Rekening :117301000251304 Tahun 2020.
34. Rekening koran Bank BRI an. Inovasi Global Solusindo Nomor Rekening :117301000251304 Tahun 2021.

(Disita dari Bhascara Rachmanto Sarasin)

35. Rekening koran Bank BRI an. Bhascara Rachmanto S. Nomor Rekening :42701023591503 bulan Oktober, November dan Desember 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. Rekening koran Bank BRI an. Bhascara Rachmanto S. Nomor Rekening :42701023591503 Tahun 2020.
37. Rekening koran Bank BRI an. Bhascara Rachmanto S. Nomor Rekening :42701023591503 bulan Januari, Februari, Maret dan April 2021.

(Disita dari Hermawati)

38. Keputusan Direksi PT Surveyor Indonesia Nomor SKD-024/DRU-VIII/DHC /2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Saudara Achmad Tauhid Latief Sebagai Pegawai Tetap Perusahaan.
39. Surat Nomor : SPK-029/PKWTT/DHC-VIII/DN/2019 tanggal 01 Agustus 2019 perihal Surat Penawaran Kerja.
40. 1 lembar Memorandum Nomor : MEM-090/DHC-VIII/DN/2019 tanggal 20 Agustus 2019 perihal Surat Keputusan Direksi.
41. Surat Tugas Nomor : SRT-033/SIMAK-X/TY/2019 perihal menugaskan secara penuh kepada Achmad Tauhid Latif sebagai Proyek Manager Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan PT Basista Teamwork.
42. Surat Tugas Nomor : SRT-026A/SIMAK-VIII/TY/2019 perihal menugaskan secara penuh kepada Achmad Tauhid Latif sebagai Proyek Manager Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Listrik Tenaga Gas PLTM 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan.
43. Surat Tugas Nomor : SRT-007A/SIMAK-IV/TY/2019 perihal menugaska secara penuh kepada Achmad Tauhid Latif sebagai Proyek Manager Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Jaringan Utilities FO di Jakarta.
44. Surat Tugas Nomor: SRT-048/SIMAK-XI/TY/2019 perihal menugaskan secara penuh kepada Edy Darman Tenri Sau sebagai Proyek Manager Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic.
45. Surat Nomor : SRT-030/SIMAK-VIII/TY/2019 tanggal 13 Agustus 2019 perihal Surat Penawaran kerja kepada Sdr.Edy Darman Tenri Sau.
46. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu Nomor : PERJ155/ SIMAK/ TYA/111/2019 perihal Perjanjian Kerja antara Tri Yulianto sebagai pihak pertama dan Edy Darman Tenri Sau sebagai pihak kedua.



47. Surat Nomor : SPK-189/SIMAK-IX/HSY/2023 tanggal 12 September 2023 perihal Surat Penawaran Kerja kepada Sdr. Edy Darman tenri Sau.
48. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu Nomor : PERJ-247/ SIMAK/ HSY/IX/2023 perihal Perjanjian Kerja antara Helmy Satria Yudha sebagai pihak pertama dan Edy Darman Tenri Sau sebagai pihak kedua.
49. Keputusan Direksi PT. Surveyor Indonesia (PERSERO) Nomor : SKD-152/DRU-XI/DHC/2021 tanggal 11 November 2021 tentang Alih Jabatan Saudara Asmara Hady
50. Keputusan Direksi PT. Surveyor Indonesia (Persero) Nomor : SKD - 004/DRU-VII/DHC/2020 tanggal 24 Juli 2020 tentang Promosi Saudara Asmara Hady
51. Surat Tugas Nomor : SRT-001/SIMAK-I/TY/2019 perihal menugaskan secara penuh kepada Asmara Hadi sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Bagian Komersial 2 di Cabang Makassar.

(Disita dari Indra Gumilar Prasetya)

52. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penawaran Kerjasama Pekerjaan Penyewaan Alat Survey Topografi dan Boring No. 005/ 22/V/ A/SPH/2019 tanggal 22 Mei 2019 senilai Rp.96.500.000,-.
53. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penawaran Kerjasama Pekerjaan Penyewaan Alat Survey Topografi dan Boring No. 004/22/V/A/ SPH/ 2019 tanggal 22 Mei 2019 senilai Rp.120.000.000,-.
54. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penawaran Kerjasama Pekerjaan Penyewaan Alat Survey Topografi dan Boring No. 003/22/V/A/ SPH/ 2019 tanggal 22 Mei 2019 senilai Rp.99.200.000,-.
55. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penawaran Kerjasama Pekerjaan Penyewaan Alat Survey Topografi dan Boring No. 002/22/V/A/SPH/ 2019 tanggal 22 Mei 2019 senilai Rp.100.500.000,-.
56. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penawaran Kerjasama Pekerjaan Penyewaan Alat Survey Topografi dan Boring No. 001/22/V/A/SPH/ 2019 tanggal 22 Mei 2019 senilai Rp.105.000.000,-.
57. 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice No.: INV.05.05/IGP/SI-MKS/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp.79.375.000,-
58. 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice No.: INV.01.05/IGP/SI-MKS/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp.97.500.000,-



59. 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice No : INV.04.05/IGP/SI-MKS/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp. 98.700.000,-
60. 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice No : INV.03.05/IGP/SI-MKS/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp. 79.500.000,-
61. 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice No : INV.02.05/IGP/SI-MKS/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp. 84.000.000,-
62. 1 (satu) rangkap Rekening Tahapan BCA periode Mei 2019 Nomor Rekening 4491399451 an. Indra Gumilar Prasetya.
63. 1 (satu) rangkap Rekening Tahapan BCA periode Juli 2019 Nomor Rekening 4491399451 an. Indra Gumilar Prasetya.
64. 1 (satu) rangkap Bukti Slip Setoran BCA senilai Rp. 245.687.000,-
(Disita dari M. Rijal)
65. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019 nomor polisi: B 1657 FZM warna hitam metalik tanggal 18 Oktober 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
66. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019 nomor polisi: B 1646 FIM warna hitam metalik tanggal 18 Oktober 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
67. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 nomor polisi : B 2957 SZU warna hitam metalik tanggal 18 November 2019 senilai Rp.15.000.000,-.
68. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 nomor polisi : B 1646 FIM warna hitam metalik tanggal 18 November 2019 senilaiRp.15.000.000,-
69. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 nomor polisi : B 2496 KFJ warna putih tanggal 18 November 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.

Halaman 26 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 nomor polisi : KT 1741 ZW warna abu-abu metalik tanggal 18 November 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
71. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 nomor polisi : KT 1766 K warna abu-abu metalik tanggal 18 November 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
72. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 nomor polisi : B 1657 FZM warna hitam metalik tanggal 18 November 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
73. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 nomor polisi : KT 1741 ZW warna abu-abu metalik tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
74. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 nomor polisi : B 2496 KFJ warna putih tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
75. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 nomor polisi : KT 1766 K warna abu-abu metalik tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
76. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan



- tanggal 15 Januari 2020 nomor polisi : B 1657 FZM warna hitam metalik tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
77. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 nomor polisi : B 1646 FIM warna hitam metalik tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
78. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 nomor polisi : B 2957 SZU warna putih tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
79. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 nomor polisi : KT 1741 ZW warna abu-abu metalik tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
80. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 nomor polisi : KT 1766 K warna abu-abu metalik tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
81. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 nomor polisi : B 2957 SZU warna hitam metalik tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
82. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 nomor polisi : B 1657 FZM warna hitam metalik tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
83. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan



- tanggal 15 Februari 2020 nomor polisi : B 1646 FIM warna hitam metalik tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
84. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 nomor polisi : B 1657 FZM warna hitam metalik tanggal 17 Maret 2020 senilai Rp.15.000.000,-.
85. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 nomor polisi : B 2957 SZU warna hitam metalik tanggal 17 Maret 2020 senilai Rp.15.000.000,-.
86. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 nomor polisi : B 1646 FIM warna hitam metalik tanggal 17 Maret 2020 senilai Rp.15.000.000,-.
87. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 nomor polisi : KT 1766 K warna abu-abu metalik tanggal 17 Maret 2020 senilai Rp.15.000.000,-.
88. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 nomor polisi : B 2496 KFJ warna putih tanggal 17 Maret 2020 senilai Rp.15.000.000,-.
89. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 nomor polisi : KT 1741 ZW warna abu-abu metalik tanggal 17 Maret 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
90. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 nomor polisi : B 2957 SZU warna hitam metalik tanggal 17 Mei 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.



91. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 nomor polisi B 1657 FZM warna hitam metalik tanggal 17 Mei 2020 senilai Rp. 15.000.000,-
92. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 nomor polisi: B 1646 FIM warna hitam metalik tanggal 17 Mei 2020 senilai Rp. 15.000.000,-
93. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 nomor polisi: KT 1741 ZW warna abu-abu metalik tanggal 17 Mei 2020 senilai Rp. 15.000.000,-
94. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020 nomor polisi: B 2496 KFJ warna putih tanggal 17 Juni 2020 senilai Rp. 15.000.000,-
95. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020 nomor polisi: B 2957 SZU warna hitam metalik tanggal 17 Juni 2020 senilai Rp. 15.000.000,-
96. 4 lembar Screenshoot bukti transfer.
(Disita dari M. Ridho Umbaran)
97. 1 bundel dokumen Permohonan Pengembalian Dana Nomor 085/Law/MHM/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Pengembalian Dana.
98. 1 lembar cek BNI untuk Nomor Rekening : 0101466749 an. BasistaTeamwork sejumlah Rp. 325.000.000,- tanggal 30 September 2020.
99. 1 lembar cek BRI Sejumlah Rp. 210.000.000,- tanggal 24 Juli 2020
100. Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 26 Oktober 2020 (Bank BNI).



101. 1 lembar Kwitansi dari M. Ridho Umbaran sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran biasa pengurusan administrasi pengajuan kredit ke Bank Swasta atas nama PT. Cahaya Sakti.
102. 1 lembar invoice tanggal 13 Juli 2020 kuitansi nomor : A004-CS (telah diterima oleh PT. Cahaya Sakti dari Bp. M. Ridho Umbaran.
103. Rekening koran Bank Bri an. Titin Dwi Tyasti Nomor Rekening 324801016125536 bulan Juli, September, November dan Desember 2019, Tahun 2020.
104. Rekening Koran Bank BRI an. M. Ridho Umbaran Nomor Rekening :120901002802500 bulan Desember 2019, Tahun 2020, dan Januari 2021.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Achmad Tauhid Latif.

(Disita dari Agus Ibrahim)

105. Uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Agung Pambudi.

(Disita dari Dian Vita Juliastanti)

106. Uang tunai sebesar Rp. 12.835.500,- (dua belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Agung Pambudi.

(Disita dari Jhonson Lumbatoruan)

107. Uang tunai sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Agung Pambudi dan Terdakwa I Fachrul Madin.

(Disita dari M.Rijal)

108. Uang tunai sebesar Rp. 17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa I Fachrul Madin.

(Disita dari Padi Fadillah)

109. Uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa I Fachrul Madin.

(Disita dari Jasi Ekarini)



110. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 269 atas nama Tri Yulianto.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Achmad Tauhid Latif.

(Disita dari Yuanito Bayu Ardi Sasongko)

111. Rekening koran Bank BRI an. Nur Multazam Nurdin Nomor Rekening : 040301031999507 bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2020, Tahun 2021, bulan Januari, Februari, dan Maret tahun 2022.
112. Rekening koran Bank BRI an. Asmara Hady Nomor Rekening 448001010041533 bulan September, Oktober, November, Desember Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, bulan Januari, Februari dan Maret tahun 2022.
113. Rekening koran Bank BCA an. Asmara Hady Nomor Rekening : 2900269709 bulan Juli, September, Oktober, November, Desember 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, bulan Januari dan Februari 2022.
114. Rekening koran Bank Mandiri an. Asmara Hady Nomor Rekening : 1490003036573 bulan September tahun 2021.
115. Rekening koran Bank BRI an. Leopold Indra AL Nomor Rekening : 040301047712503 bulan Oktober, November, Desember tahun 2020, Tahun 2021, bulan Januari, Februari, dan Maret tahun 2022.
116. Rekening koran Bank BRI an. Leopold Indra AL Nomor Rekening : 729001000336530 bulan Oktober, November, Desember, Tahun 2021, bulan Januari, Februari, Maret tahun 2022.
117. Rekening koran Bank BRI an. A. Gita Gandrika Muc Nomor Rekening: 358201036884536 bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember tahun 2019, Tahun 2021, Tahun 2021, bulan Januari, Februari, Maret 2022.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Achmad Tauhid Latif.

(Disita dari indra Gumilar Prasetya)

118. Uang tunai sebesar Rp. 9.766.000,- (sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Agung Pambudi.

(Disita dari Zulkifli)



119. Uang tunai sebesar Rp. 70.600.000,- (tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah).

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa I Fachrul Madin.

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluhribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks tanggal 29 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD RIDHO UMBARAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi Secara Bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dan denda sejumlah **Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 4.009.100.580,00 (Empat milyar sembilan juta seratus ribu lima ratus delapan puluh Rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana secara proporsional dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam RUTAN;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Dokumen dari PT. Basista Teamwork :

1. Prosedur Perolehan Proyek P-PROYEK-01

A. Penerimaan Info Potensi Proyek

- 1) Surat Permintaan Penawaran dari PT. Basista Teamwork (BOQ, RKS dan Surat Undangan) No. ST/I-009A/II1/2019 Tanggal 13 September 2019.
- 2) Form FP-Proyek01-01 Form Kajian Resiko Tahap Pemasaran Tanggal 28 Agustus 2019.

Halaman 33 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS



B. Pertimbangan Menggunakan Mitra Bisnis

- 1) Form FP-Proyek01-02 Kajian Mitra Bisnis (tidak ada)

C. Proses Tender

- 1) Form FP-Proyek01-03 Form Pemeriksaan Tender Tanggal 23 September 2019.
- 2) Surat Balasan Permintaan Penawaran (PTSI) No. PH-013/SIMAK-IX/TY/2019 Tanggal 21 September 2019.
- 3) Undangan Negosiasi No. ST/BST/UN-010/IX/2019 Tanggal 23 September 2019.
- 4) Berita Acara Negosiasi No. ST/BST/BAN-010/IX/2019 Tanggal 25 September 2019.

D. Proses Kontrak

- 1) Permohonan Legal Review Draft Kontrak No. MEM- 006/SIMAK-X/TY/2019 Tanggal 14 Oktober 2019.
 - 2) Hasil Legal Review Draft Kontrak No. MEM-052/SP-X/RSO/2019 Tanggal 17 Oktober 2019.
 - 3) Form FP-Proyek01-04 Pemeriksaan isi Kontrak Tanggal 11 Oktober 2019.
 - 4) SPK Kontrak Final Tanda tangan No. KP-099/BST-A8/X/JKT/2019.
2. Prosedur Persiapan Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-02

A. Pembentukan Tim/Penanggungjawab Proyek

- 1) Proyek FP-Proyek02-01 Surat Penunjukan Tim Tanggal 30 September 2019.
- 2) Notulen Tentang Ruang Lingkup Pekerjaan (tidak ada)
- 3) Proyek FP-Proyek02-02 Kriteria Tinjauan Ulang Kontrak Tanggal 28 Oktober 2019.
- 4) Notulen Rapat Pembahasan Awal Kontrak (tidak ada)

B. Kajian Resiko Proyek & K3LL

- 1) Proyek FP-Proyek02-03 Formulir Monitoring Mutu & K3LL Tanggal 30 September 2019

C. Pembuatan dan Persetujuan Rencana Anggaran dan Biaya Proyek (RAB Proyek)

- 1) Pembuatan Draft RAB Proyek dan Permohonan Persetujuan RAB Tanggal 07 November 2019 No. MEM-003/SIMAK-XI/TY/2019
- 2) Persetujuan Penandatanganan RAB Proyek Tanggal 19 November 2019.

Halaman 34 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. Penyiapan Sumber Daya Manusia

- 1) Penyiapan Sumber Daya Manusia (tidak ada)
- 2) Daftar Tenaga Yang dibutuhkan (tidak ada)
- 3) Proses Rekrutmen Tenaga Pelaksana

E. Penyusunan Prosedur Pelaksanaan Proyek

- 1) Penyusunan Prosedur Pelaksanaan Proyek yang telah disetujui (tidak ada)

F. Pembuatan Skedul Kerja

- 1) Pembuatan Skedul Kerja ditandatangani Kepala MP (tidak ada)
- 2) Kurva S (tidak ada)

G. Penyiapan Alat Operasi, Subkon dan Perlengkapan K3

- 1) Penyiapan Alat Operasi, Subcont (tidak ada)

H. Pelaksanaan Kickoff Meeting

I. Pelaksanaan Kickoff Meeting (tidak ada)

3. Prosedur Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-03

A. Pelaksanaan Proyek

- 1) Notulen Sosialisasi Tahapan Pekerjaan, Prosedur dan Skedul yang telah ditetapkan kepada seluruh pelaksana proyek (tidak ada)
- 2) Progress Kemajuan Proyek dalam ASMOP (tidak ada)
- 3) MK3LL Proyek atau MR melaksanakan Pengendalian Pemantauan Resiko Berdasarkan FORM FP-Proyek02-02 (tidak ada)

B. Pendanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan

- 1) Untuk Pendanaan Proyek mengikuti kebijakan dan Prosedur Anggaran (P-DKA-01) dari DKA (tidak ada).
- 2) Permohonan Droning November 2019 No. MEM-006/SIMAK-XI/TY/2019 Tanggal 18 November 2019.
- 3) Rekomendasi atas Permohonan Droning Dana oleh Cabang Makassar No. MEM-051/SBINFRAS-XI/HW/2019 Tanggal 26 Nov. 2019.
- 4) Permohonan Droning Desember 2019 No. MEM-016/SIMAK-XII/TY/2019 Tanggal 12 Desember 2019.
- 5) Rekomendasi atas Permohonan Droning Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-004/SBINFRAS-XII/HW/2019 Tanggal 19 Des. 2019.
- 6) Permohonan Droning Januari 2020 No. MEM-094/SIMAK-I/TY/2020 Tanggal 22 Januari 2020.



- 7) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-263/SBINFRAS-I/HW/2020 tanggal 27 Januari 2020.
- 8) Permohonan Dropping Maret 2020 No. MEM-093/SIMAK-III/TY/2020 Tanggal 13 Maret 2020.
- 9) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Maret 2020 No. ND-022/DKA-III/YS/2020 Tanggal 22 Maret 2020.
- 10) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Maret 2020 No. ND-001/SIMAK-IV/TY/2020 Tanggal 8 April 2020.
- 11) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Maret Tahap II No. ND-025/DKA-IV/YS/2020 tanggal 16 April 2020.
- 12) Permohonan Dropping April 2020 No. MEM-041/SIMAK-IV/TY/2020 Tanggal 09 April 2020.
- 13) Permohonan Persetujuan Dropping Khusus Cabang Makassar Bulan April 2020 No. ND-006/DKA-V/YS/2020 Tanggal 06 Mei 2020.
- 14) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan April Tahap II No. ND-015/D KA-V/YS/2020 Tanggal 12 Mei 2020.
- 15) Permohonan Dropping Mei 2020 No. MEM-046/SIMAK-V/TY/2020 Tanggal 11 Mei 2020.
- 16) Permohonan Dropping Mei 2020 No. MEM-205/SBINFRAS-V/HW/2020 Tanggal 19 Mei 2020.
- 17) Permohonan Persetujuan Dropping Cab. Madya Makassar bulan Mei 2020 Tahap I No. ND-034/DKA-V/YS/2020 Tanggal 20 Mei 2020.
- 18) Permohonan Persetujuan Dropping Cab. Madya Makassar Bulan Mei 2020 Tahap II No. ND-017/DKA-VI/YS/2020 Tanggal 09 Juni 2020.
- 19) Permohonan Dropping Juni 2020 No. MEM-144/SIMAK-VI/TY/2020 Tanggal 19 Juni 2020.
- 20) Permohonan Dropping Mei 2020 No. MEM-323/SBINFRAS-VI/HW/2020 Tanggal 26 Juni 2020.



- 21) Permohonan Persetujuan Dropping Cab. Madya Makassar Bulan Juni 2020 Tahap I No. ND-052/DKA-VI/YS/2020 Tanggal 30 Juni 2020.
- 22) Permohonan Draping Juli 2020 No. MEM-123/SIMAK-VII/TY/2020 Tanggal 17 Juli 2020.
- 23) Permohonan Draping Juli 2020 No. MEM-383/SBINFRAS-VII/HW/2020 Tanggal 20 Juli 2020.
- 24) Permohonan Persetujuan Dropping Cab. Madya Makassar Bulan Juni 2020 Tahap I No. ND-047/DKA-VII/YS/2020 Tanggal 22 Juli 2020.
- 25) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Juli 2020 Tahap II No. ND-007/DKA-VIII/YS/2020 Tanggal 06 Agustus 2020.
- 26) Permohonan Dropping Agustus 2020 No. MEM-111/SIMAK- VIII/ TY/2020 Tanggal 17 Agustus 2020.
- 27) Permohonan Draping Agustus 2020 No. MEM-273/SBINFRAS-VIII/HW/2020 Tanggal 19 Agustus 2020.
- 28) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Agustus 2020 Tahap I No. ND-036/DKA-VIII/YS/2020 Tanggal 25 Agustus 2020.
- 29) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Agustus 2020 Tahap II No. MD-034/DKA-IX/YS/2020 Tanggal 15 September 2020.
- 30) Permohonan Draping September 2020 No. ND-001/SIMAK- IX/TY/2020 Tanggal 21 September 2020.
- 31) Permohonan Draping September 2020 No. MEM-080/SIMAK- IX/TY/2020 Tanggal 11 September 2020.
- 32) Permohonan Draping September 2020 No. MEM-151/SIMAK- IX/TY/2020 Tanggal 21 September 2020.
- 33) Permohonan Draping September 2020 No. MEM-451/SBINFRAS- IX/HW/2020 Tanggal 23 September 2020.
- 34) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan September 2020 Tahap I No. ND-001/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 21 September 2020.
- 35) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan September 2020 Tahap I No. ND-059/DKA-IX/YS/2020 Tanggal 23 September 2020.

Halaman 37 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 36) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan September 2020 Tahap 2 NO. ND-018/DKA-X/YS/2020 Tanggal 12 Oktober 2020.
- 37) Permohonan Dropping Oktober 2020 No. MEM-036/SIMAK-X/TY/2020 Tanggal 6 Oktober 2020.
- 38) Permohonan Dropping Oktober 2020 No. MEM-159/SIMAK-X/TY/2020 Tanggal 21 Oktober 2020.
- 39) Permohonan Dropping Oktober 2020 No. MEM-306/SBINFRAS-X/HW Tanggal 19 Oktober 2020/2020.
- 40) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Oktober 2020 Tahap I No. ND-036/DKA-X/YS/2020 Tanggal 06 Oktober 2020.
- 41) Permohonan Dropping November 2020 No. MEM-097/SIMAK-XI/TY/2020 Tanggal 13 November 2020.
- 42) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Oktober 2020 Tahap II No. ND-027/DKA-XI/YS/2020 Tanggal 16 November 2020.
- 43) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan November 2020 Tahap I No. ND-046/DKA-XI/YS/2020 Tanggal 25 November 2020.
- 44) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan November 2020 Tahap II No. ND-025/DKA-XII/YS/2020 Tanggal 11 Desember 2020.
- 45) Daftar Uang Muka Operasional, Pengajuan dan PJUM
- 46) List Pengajuan Uang Muka
- 47) Daftar Penggajian Personil
- 48) List Penggajian Personil
- 49) List Penyewaan
- 50) List Penyewaan
- 51) List Perjalanan Dinas
- 52) List Perjalanan Dinas

C. Pemantauan Kemajuan Proyek

- 1) MK3LL Proyek atau MR melaksanakan Pengendalian Pemantauan Resiko Memastikan Para Pelaksana dan Subcon menjalankan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan IK (tidak ada)
- 2) Monitoring Progress Kemajuan Proyek dalam ASMOP (tidak ada)



D. Pemantauan Pengendalian Resiko sesuai dengan Matriks Respon Resiko

- 1) Pengendali MK3LL memantau resiko (tidak ada)

E. Pembuatan Laporan Hasil Pekerjaan

- 1) Laporan Tahap 1 (tidak ada)
- 2) Laporan Tahap 2 (tidak ada)
- 3) Laporan Tahap 3 (tidak ada)
- 4) Laporan Tahap 4 (tidak ada)

F. Penyerahan Laporan dan Berita Acara Serah Terima

- 1) BAPP Tahap 1 No.BAPP 006/SIMAK-III/TY/2020 Tanggal 11 Maret 2020
- 2) BAPP Tahap 2 No.BAPP 029/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 29 September 2020.
- 3) BAPP Tahap 3 No. BAPP 175/SIMAK-XII/TY/2021 Tanggal 06 Desember 2021

G. Pembuatan Invoice

- 1) Admin Membuat PPI sesuai dengan Prosedur Keuangan (PDKA-04)
 - a. Surat permohonan pembayaran termin 1 No. SRT-081/SIMAK-XI/TY/2020 Tanggal 30 November 2020 dan PPI dan Invoice Tahap 1 No. INV-0243/MK-11/TY/20 Tanggal 30 November 2020
 - b. Surat permohonan pembayaran termin 2 No. SRT-026/SIMAK-III/TY/2019 Tanggal 31 Maret 2021 dan PPI dan Invoice Tahap 2 No. INV-0087/MK-03-TY/21 Tanggal 31 Maret 2021
 - c. Surat permohonan pembayaran termin 3 No. SRT-013/SIMAK-VII/HSY/2022 Tanggal 29 Juli 2022 dan PPI dan Invoice Tahap 3 No. INV-1411/MK-07-HS/22 Tanggal 29 Juli 2022
 - d. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1-1 No. SRT-015/SIMAK-VI/TY/2020 Tanggal 24 Juni 2020
 - e. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1-2 No. SRT-062/SIMAK-III/TY/2021 Tanggal 31 Maret 2021
 - f. Surat Teguran SRT-050/SIMAK-IV/TY/2021 Tanggal 26 April 2021
 - g. Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar & Cek

H. Pengakhiran Proyek

Dokumen dari PT Cahaya Sakti :

4. Prosedur Perolehan Proyek P-PROYEK-01



A. Penerimaan Info Potensi Proyek

- 1) Surat Permintaan Penawaran dari PT Cahaya Sakti No. 0708/adm A/II/19 Tanggal 29 Juli 2019 (Scan)
- 2) Form FP-Proyek01-01 Kajian Resiko Tahap Pemasaran Tanggal 12 Agustus 2019

B. Pertimbangan Menggunakan Mitra Bisnis

- 1) Form FP-Proyek01-02 Kajian Mitra Bisnis (tidak ada)

C. Proses Tender

- 1) Form FP-Proyek01-03 Form Pemeriksaan Tender (tidak ada)
- 2) Surat Balasan Penawaran (PTSI) No. PH-003/SIMAK-VIII/TY/2019 Tanggal 05 Agustus 2019
- 3) Surat Konfirmasi Penawaran (PT Cahaya Sakti) No. 0709/ adm/ CS-SI/VIII/2019 Tanggal 07 Agustus 2019

D. Proses Kontrak

- 1) Permohonan Legal Review Draft Kontrak No. MEM- 003/S1MAKA/III/TY/2019 Tanggal 12 Agustus 2019
- 2) Hasil Legal Review Draft Kontrak No. MEM-046/SP-VIII/MOD/2019 Tanggal 15 Agustus 2019
- 3) Form FP-Proyek01-04 Pemeriksaan isi Kontrak (tidak ada)
- 4) SPK Kontrak Final Tanda tangan No. PERJ-001/SIMAK-VIII/TY/2019 Tanggal 02 Agustus 2019

5. Prosedur Persiapan Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-02

A. Pembentukan Tim/Penanggunjawab Proyek

- 1) Proyek FP-Proyek02-01 Surat Penunjukan Tim (tidak ada)
- 2) Notulen Tentang Ruang Lingkup Pekerjaan (tidak ada)
- 3) Proyek FP-Proyek02-02 Kriteria Tinjauan Ulang Kontrak Tanggal 29 Agustus 2019
- 4) Notulen Rapat Pembahasan Awal Kontrak (tidak ada)

B. Kajian Resiko Proyek & K3LL

- 1) Proyek FP-Proyek02-03 Formulir Monitoring Mutu & K3LL (tidak ada)

C. Pembuatan dan Persetujuan Rencana Anggaran dan Biaya Proyek (RAB Proyek)

- 1) Pembuatan Draft RAB Proyek dan Permohonan Persetujuan RAB No. MEM-002/SIMAK-IX/TY/2019 Tanggal 04 September 2019
- 2) Persetujuan Penandatanganan RAB Proyek Tanggal 16 Mei 2019 (tidak ada)



D. Penyiapan Sumber Daya Manusia

- 1) Perjanjian Kerja Personil Proyek

E. Penyusunan Prosedur Pelaksanaan Proyek

- 1) Penyusunan Prosedur Pelaksanaan Proyek yang telah disetujui

F. Pembuatan Skedul Kerja

- 1) Pembuatan Skedul Kerja ditandatangani Kepala MP (tidak ada)
- 2) Kurva S (tidak ada)

G. Penyiapan Alat Operasi, Subkon dan Perlengkapan K3

- 1) Penyiapan Alat Operasi, Subcon (tidak ada)

H. Pelaksanaan Kickoff Meeting

- 1) Pelaksanaan Kickoff Meeting (tidak ada)

6. Prosedur Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-03

A. Pelaksanaan Proyek

- 1) Notulen Sosialisasi Tahapan Pekerjaan, Prosedur dan Skedul yang telah ditetapkan kepada seluruh pelaksana proyek (tidak ada)
- 2) Progress Kemajuan Proyek dalam ASMOP (tidak ada)
- 3) MK3LL Proyek atau MR melaksanakan Pengendalian Pemantauan Resiko Berdasarkan FORM FP-Proyek02-02 (tidak ada)

B. Pendanaan dan Pertanggung Jawaban Penggunaan

- 1) Untuk Pendanaan Proyek mengikuti kebijakan dan Prosedur Anggaran (P-DKA-01) dari DKA (tidak ada)
- 2) Permohonan Draping Agustus 2019 No. MEM-014/SIMAK-VIII/TY/2019 Tanggal 20 Agustus 2019
- 3) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-014/SBINFRAS-VIII/HU/2019 Tanggal 23 Agustus 2019 (tidak ada)
- 4) Permohonan Draping Khusus No. ND-017/SIMAK-IX/TY/2019 Tanggal 06 September 2019
- 5) Permohonan Draping September 2019 No. MEM-008/SIMAK-IX/TY/2019 Tanggal 20 September 2019
- 6) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana oleh Cab. Makassar No. MEM-014/SBINFRAS-IX/HW/2019 Tanggal 23 September 2019
- 7) Permohonan Draping Oktober 2019 No. MEM-009/SIMAK-X/TY/2019 Tanggal 21 Oktober 2019

Halaman 41 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-010/SBINFRS-X/HW/2019 Tanggal 24 Oktober 2019
- 9) Permohonan Draping Desember 2019 NO. MEM-016/SIMAK-XII/TY/2019 Tanggal 12 Desember 2019
- 10) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana oleh Cab. Makassar No. MEM-004/SBINFRAS-XII/HU/2019 Tanggal 19 Desember 2019
- 11) Permohonan Draping Januari 2020 No. MEM-094/SIMAK-I/TY/2020 Tanggal 22 Januari 2020
- 12) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-263/SBINFRAS-I/HW/2020 Tanggal 27 Januari 2020
- 13) Permohonan Draping Maret 2020 No. MEM-093/SIMAK-III/TY/2020 Tanggal 13 Maret 2020
- 14) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Maret 2020 No. ND-022/DKA-III/YS/2020 Tanggal 22 Maret 2020
- 15) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Maret Tahap II No. ND-025/DKA-IV/YS/2020 Tanggal 16 April 2020
- 16) Permohonan Draping April 2020 No MEM-041/SIMA IV/TY/2020 Tanggal 09 April 2020
- 17) Permohonan Persetujuan Dropping Khusus Cabang Makassar Bulan April 2020 No. ND-006/DKA-V/YS/2020 Tanggal 06 Mei 2020
- 18) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan April Tahap II ND-015/DKA-V/YS/2020 Tanggal 12 Mei 2020
- 19) Permohonan Draping Mei 2020 No. MEM-046/SIMAK-V/TY/2020 Tanggal 11 Mei 2020
- 20) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Mei 2020 Tahap I No. ND-034/DKA-V/YS/2020 Tanggal 20 Mei 2020
- 21) Permohonan Persetujuan Dropping Cab. Madya Makassar Bulan Mei 2020 Tahap II No. ND-017/DKA-VI/YS/2020 Tanggal 09 Juni 2020

Halaman 42 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22) Permohonan Draping Juni 2020 No. MEM-144/SIMAK-VI/TY/2020
Tanggal 19 Juni 2020
- 23) Permohonan Persetujuan Dropping Cab. Madya Makassar Bulan
Juni 2020 Tahap I No. ND-052/DKA-VI/YS/2020 Tanggal 30 Juni
2020
- 24) Permohonan Draping Juli 2020 No. MEM-123/SIMAK-VII/TY/2020
Tanggal 17 Juli 2020
- 25) Permohonan Persetujuan Dropping Cab. Madya Makassar Bulan
Juni 2020 Tahap I No. ND-047/DKA-VII/YS/2020 Tanggal 22 Juli
2020
- 26) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar
Bulan Juli 2020 Tahap II No. ND-007/DKA-VIII/YS/2020 Tanggal
06 Agustus 2020
- 27) Permohonan Dropping Agustus 2020 No. MEM-111/SIMAK-VIII/
TY/2020 Tanggal 17 Agustus 2020
- 28) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar
Bulan Agustus 2020 Tahap I No. ND-036/DKA-VIII/YS/2020
Tanggal 25 Agustus 2020
- 29) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar
Bulan Agustus 2020 Tahap II No. ND-034/DKA-IX/YS/2020
Tanggal 15 September 2020
- 30) Permohonan Dropping September 2020 No. MEM-151/SIMAK-
IX/TY/2020 Tanggal 21 September 2020
- 31) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar
Bulan September 2020 Tahap I No. ND-059/DKA-IX/YS/2020
Tanggal 23 September 2020
- 32) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar
Bulan September 2020 Tahap 2 No. ND-018/DKA-X/YS/2020
Tanggal 12 Oktober 2020
- 33) Daftar Uang Muka Operasional, Pengajuan dan PJUM
- 34) List Pengajuan Uang Muka
- 35) Daftar Penggajian Personil
- 36) List Penggajian Personil
- 37) Daftar Penyewaan kendaraan
- 37) List Penyewaan
- 38) Daftar Perjalanan Dinas
- 39) List Perjalanan Dinas

Halaman 43 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Pemantauan Kemajuan Proyek

- 1) MK3LL Proyek atau MR melaksanakan Pengendalian Pemantauan Resiko Memastikan Para Pelaksana dan Subcon menjalankan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan IK (tidak ada)
- 2) Monitoring Progress Kemajuan Proyek dalam ASMOP (tidak ada)
- 3) Pengendali MK3LL Memantau Resiko (tidak ada)

D. Pembuatan Laporan Hasil Kerja

- 1) Laporan Tahap 1 (tidak ada)
- 2) Laporan Tahap 2 (tidak ada)
- 3) Laporan Tahap 3 (tidak ada)
- 4) Laporan Tahap 4 ((tidak ada)

E. Penyerahan Laporan dan Berita Acara Serah Terima

- 1) BAP P Tahap 1 No. BAPP-053/SIMAK-XII/TY/2019 Tanggal 13 Desember 2019
- 2) BAP P Tahap 2 No. BAPP-002/SIMAK-IirTY/2020 Tanggal 21 Februari 2020
- 3) BAPP Tahap 3 No. BAPP-019/SIMAK-III/TY/2020 Tanggal 20 Maret 2020
- 4) BAPP Tahap 4 No. BAPP-013/SIMAK-V/TY/2020 Tanggal 28 Mei 2020

F. Pembuatan Invoice

- 1) Admin Membuat PPI sesuai dengan Prosedur Keuangan (P-DKA-04)
 - a. PPI dan Invoice Tahap 1, Surat Permohonan Pembayaran Termin I No.SRT-059/SIMAK-XII/TY/2019 Tanggal 17 Desember 2019 dan Invoice Tahap 1 No. INV-0213/MK-12/TY/19 Tanggal 17 Des. 2019
 - b. PPI dan Invoice Tahap 2, Surat Permohonan Pembayaran Termin II No.SRT-030/SIMAK-II/TY/2020 Tanggal 25 Februari 2020 dan Invoice Tahap II No. INV-0029/MK-02/TY/20 Tanggal 25 Feb. 2020
 - c. PPI dan Invoice Tahap 3, Surat Permohonan Pembayaran Termin III No.SRT-082/SIMAK-XI/TY/2020 Tanggal 30 November 2020 dan Invoice Tahap III No. INV-0244/MK-11/TY/20 Tanggal 30 Nov. 2020
 - d. PPI dan Invoice Tahap 4, Surat Permohonan Pembayaran Termin IV No. SRT-083/SIMAK-XI/TY/2020 Tanggal 30

Halaman 44 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- November 2020 dan Invoice Tahap IV No. INV-0245/MK-11/TY/20 Tanggal 30 Nov. 2020
- e. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1 - 1 No. SRT-044/SIMAK-III/TY/2020 Tanggal 12 Maret 2020
 - f. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1 - 2 No. SRT-015/SIMAK-VI/TY/2020 Tanggal 03 Juni 2020
 - g. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 2 - 1 No. SRT-014/SIMAK-VI/TY/2020 Tanggal 03 Juni 2020
 - h. Konfirmasi Pembayaran Cahaya Sakti No. 25-CSA/II/2020 Tanggal 30 Juni 2020
 - i. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 2 - 2 No. SRT-029/SIMAK-VIII/TY/2020 Tanggal 26 Agustus 2020
 - j. Kesanggupan bayar Cahaya Sakti No. 016/ADM-SKP/ CS/ XII/ 2020 Tanggal 07 Desember 2020
 - k. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 3 - 1 No. SRT-060/SIMAK-III/TY/2021 Tanggal 31 Maret 2021
 - l. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 4 - 1 No. SRT-061/SIMAK-III/TY/2021 Tanggal 31 Maret 2021
 - m. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 3 - 2 No. SRT-048/SIMAK-IV/TY/2021 Tanggal 26 April 2021
 - n. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 4 -2 No. SRT-049/SIMAK-IV/TY/2021 Tanggal 26 April 2021
 - o. Surat Teguran Piutang Invoice Tahap 1 No. SRT-053/SIMAK-IV/TY/2021 Tanggal 26 April 2021
 - p. Surat Teguran Piutang Invoice Tahap 2 No. SRT-054/SIMAK-IV/TY/2021 Tanggal 26 April 2021
 - q. Undangan Rapat PT Cahaya Sakti - Penjelasan Pembayaran No. SRT-041 /SIMAK-VII I/TY/2021 Tanggal 23 Agustus 2021
 - r. Surat pemberitahuan reschedule rapat No. 032/SPI/ CSA/III/ 2021 Tanggal 27 Agustus 2021

G. Pengakhiran Proyek

Dokumen dari PT. INOVASI GLOBAL (WILAYAH MAKASSAR)

7. Prosedur Perolehan Proyek P-PROYEK-01

A. Penerimaan Info Potensi Proyek

- 1) Surat Permintaan Penawaran dari PT IGS Makassar (BOQ, RKS dan Surat Undangan) No. 002/IGS.SK-SP/IGS/19-VI Tanggal 18 November 2019

Halaman 45 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Proses Tender

- 1) Surat Balasan Penawaran (PTSI) No. PH-004/SIMAK-XI/ TY/ 2019

C. Proses Kontrak

- 1) SPK Kontrak Final Tanda tangan No. 001/IGS.SK-K.SPK/19-XI

8. Prosedur Persiapan Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-02

A. Pembuatan dan Persetujuan Rencana Anggaran dan Biaya Proyek (RAB Proyek)

- 1) RAB

B. Penyiapan Sumber Daya Manusia

- 1) Form CV

9. Prosedur Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-03

A. Pendanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan

- 1) Uang Muka Operasional, Pengajuan dan PJUM
- 2) List Pengajuan Uang Muka
- 3) Penggajian Personil
- 4) List Penggajian Personil

B. Penyerahan Laporan dan Berita Acara Serah Terima

- 1) BAPP Tanggal 30 Januari 2020

C. Pembuatan Invoice

- 1) Admin Membuat PPI sesuai dengan Prosedur Keuangan (P-DKA-04)- PPI dan Invoice No. SRT-23/SIMAK-III/TY/2020 Tanggal 19 Maret 2020

Dokumen dari PT. INOVASI GLOBAL (WILAYAH JAKARTA)

10. Prosedur Perolehan Proyek P-PROYEK-01

A. Penerimaan Info Potensi Proyek

- 1) Surat Permintaan Penawaran dari PT Inovasi Global Solusindo No.004/IGS.SK-SP/IGS/19-III Tanggal 12 Maret 2019 (Scan)
- 2) Form FP-Proyek01-01 Kajian Resiko Tahap Pemasaran Tanggal 24 April 2019

B. Pertimbangan Menggunakan Mitra Bisnis

- 1) Form FP-Proyek01-02 Kajian Mitra Bisnis Tanggal 26 Maret 2019

C. Proses Tender

- 1) Form FP-Proyek01-03 Form Pemeriksaan Tender Tanggal 25 April 2019

Halaman 46 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Surat Balasan Permintaan Penawaran (PTSI) No. SRT-091/SIMAK-III/TY/2019 Tanggal 21 Maret 2019
- 3) Surat Balasan Permintaan Penawaran (PTIGS) Negosiasi No. 004/IGS.SK-SP.01/IGS/19-III Tanggal 22 Maret 2019
- 4) Surat Konfirmasi Negosiasi (PTSI) No. SRT-108/SIMAK-III/TY/2019 Tanggal 26 Maret 2019

D. Proses Kontrak

- 1) Hasil Legal Review Draft Kontrak No. MEM- 073 /SP-IV/MOD/2019 Tanggal 23 April 2019
- 2) Surat Balasan Penawaran No. 004/IGS-SK-SP.02/IGS/19-111 tanggal 27 Maret 2019
- 3) Form FP-Proyek01-04 Pemeriksaan isi Kontrak Tanggal 24 April 2019
- 4) SPK Kontrak Final Tanda tangan No. 003/IGS.SK-SP.02/IGS/19-III

11. Prosedur Persiapan Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-02

A. Pembentukan Tim/Penanggungjawab Proyek

- 1) Proyek FP-Proyek02-01 Surat Penunjukan Tim Tanggal 24 April 2019
- 2) Proyek FP-Proyek02-02 Kriteria Tinjauan Ulang Kontrak 24 April 2019

B. Kajian Resiko Proyek & K3LL

- 1) Proyek FP-Proyek02-03 Formulir Monitoring Mutu & K3LL 25 April 2019

C. Pembuatan dan Persetujuan Rencana Anggaran dan Biaya Proyek (RAB Proyek)

- 1) Pembuatan Draft RAB Proyek dan Permohonan Persetujuan RAB Tanggal 26 April 2019 No. MEM-012/SIMAK-IV/TY/2019
- 2) Persetujuan Penandatanganan RAB Proyek Tanggal 16 Mei 2019

D. Penyiapan Sumber Daya Manusia

- 1) Kontrak Personil Proyek

12. Prosedur Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-03

A. Pendanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan

- 1) Untuk Pendanaan Proyek mengikuti kebijakan dan Prosedur Anggaran (P-DKA-01) dari DKA



- a. Permohonan Dropping Mei 2019 No. MEM-009/SIMAK-V/ TY/2019 Tanggal 15 Mei 2019
- b. Permohonan Dropping Khusus No. ND-046/SIMAK-V/ TY/ 2019 Tanggal 15 Mei 2019
- c. Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh cabang Makassar No. MEM-004.SBINFRAS.V.HW.2019 Rekomendasi Dropping 16 Mei 2019
- d. Permohonan Dropping Juni 2019 MEM-005.SIMAK-VI. TY. 2019 Permohonan Dropping 25 Juni 2019
- e. Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar MEM-006.SBINFRAS.VI.HW.2019 Rekomendasi Dropping 28 Juni 2019
- f. Permohonan Dropping Juli 2019 No. MEM-012.SIMAK-VII. TY.2019 Permohonan Dropping 23 Juli 2019
- g. Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar MEM-007.SBINFRAS.VII.HW.2019 Rekomendasi Dropping 23 Juli 2019
- h. Permohonan Dropping Agustus 2019 No. MEM-014.SIMAK-VIII.TY.2019 Permohonan Dropping 20 Agustus 2019
- i. Permohonan Dropping Agustus 2019 MEM-014. SBINFRAS. VIII.HU.2019 Rekomendasi Dropping 23 Agustus 2019
- j. Permohonan Dropping September 2019 MEM-008.SIMAK-IX.TY.201 Permohonan Dropping 20 September 2019
- k. Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar MEM-014.SBINFRAS.IX.HW.2019 Rekomendasi Dropping 23 September 2019
- l. Permohonan Dropping Oktober 2019 No. MEM-009.SIMAK-X.TY.2019 Permohonan Dropping 21 Oktober 2019
- m. Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-010.SBINFRAS.X.HW.2019 Rekomendasi Dropping 24 Oktober 2019
- n. Permohonan Dropping Desember 2019 MEM-016.SIMAK-XII.TY.2019 Permohonan Dropping 12 Desember 2019
- o. Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-004.SBINFRAS.XII.HU.2019 Rekomendasi Dropping 19 Desember 2019

Halaman 48 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- p. Permohonan Dropping Januari 2020 e Office-MEM-094.
SIMAK-I.TY.2020 Permohonan Dropping 22 Januari 2020
- q. Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh
Cabang Makassar MEM-263.SBINFRAS-I.HW.2020
Rekomendasi Dropping 27 Januari 2020.
- r. Uang Muka Operasional, Pengajuan dan PJUM
- s. List Pengajuan Uang Muka
- t. Penggajian Personil dan Uang Makan
- u. List Penggajian Personil
- v. Daftar Penyewaan kendaraan
- w. Daftar Pengajuan Perjalanan Dinas

B. Penyerahan Laporan dan Berita Acara Serah Terima

- 1) BAPP Tahap 1 No. BAPP.018/SIMAK-VI/TY/2019 Tanggal 26
Juni 2019
- 2) BAPP Tahap 2 No. BAPP.018/SIMAK-VI/TY/2019 Tanggal 26
Juni 2019
- 3) BAPP Tahap 3 No. BAPP.087/SIMAK-IX/TY/2019 Tanggal 30
September 2019

C. Pembuatan Invoice

- 1) Admin Membuat PPI sesuai dengan Prosedur Keuangan (P-
DKA-04)
 - a. Surat permohonan pembayaran termin 1 No. SRT-003/
SIMAK-VIII/TY/2019 Tanggal 05 Agustus 2019 dan PPI dan
Invoice Tahap 1 No. INV-0091/MK-08/TY/19 Tanggal 02
Agustus 2019
 - b. Surat permohonan pembayaran termin 2 No. SRT-027/
SIMAK-X/TY/2019 Tanggal 09 Oktober 2019 dan PPI dan
Invoice Tahap 2 No. INV-0131/MK-10-TY/19 Tanggal 07
Oktober 2019
 - c. Surat permohonan pembayaran termin 3 No. SRT-033/
SIMAK IV/TY/2020 Tanggal 30 April 2020 dan PPI dan
Invoice Tahap 3 No. INV-0078/MK-04-TY/20 Tanggal 30
April 2020
 - d. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1-1 No. SRT-036/SIMAK-
IX/TY/2019 Tanggal 24 September 2019



- e. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1-2 No. SRT-037/SIMAK-I/TY/2019 Tanggal 31 Januari 2020
 - f. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 2-1 No. SRT-067/SIMAK-I/TY/2020 Tanggal 31 Januari 2020
 - g. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 2-2 No. SRT-016/SIMAK-VI/TY/2020 Tanggal 03 Juni 2020
 - h. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 3-1 No. SRT-096/SIMAK-VIII/TY/2020 Tanggal 26 Agustus 2020
 - i. Surat Teguran Invoice Tahap 1 SRT-040/SIMAK-IX/ TY/ 2020 Tanggal 15 September 2020
 - j. Surat Teguran Invoice Tahap 2 SRT-041/SIMAK-IX/ TY/ 2020 Tanggal 25 September 2020
 - k. Surat Konfirmasi Semua Piutang SRT-080/SIMAK-XII/ TY/ 2020 Tanggal 22 Desember 2020
 - l. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 3 - 2 No. SRT-067/SIMAK-III/TY/2021 Tanggal 31 Maret 2021
 - m. Surat Teguran Invoice Tahap 3 No. SRT-051/SIMAK-IV/TY/2021 Tanggal 26 April 2021
13. Kartu ATM Tenaga Operasional Proyek Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin pembangkit Listrik Tenaga Gas PLTG 4 X 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara PT Cahaya Sakti, sebagai berikut:
- 1) ATM an. Bella Regita Nomor: 5221 8421 2193 7111.
 - 2) ATM an. Ikram Hadi M Nomor: 5221 8421 2240 4087.
 - 3) ATM an. A. Nurfibriani Nomor: 5221 8421 2193 7483.
 - 4) ATM an. A. Ilham Nomor: 5221 8421 2240 4210.
 - 5) ATM an. Rahmatiah Danah Nomor: 5221 8421 2193 7129.
 - 6) ATM an. Ryo Ayatullah Nomor: 5221 8421 2193 7517.
 - 7) ATM an. Wahyu Saputra Nomor: 5221 8421 2193 7491.
 - 8) ATM an. Abd. Rahman Nomor: 5221 8421 0976 6532.
 - 9) ATM an. Irwan Nomor: 5221 8421 2240 4061.
 - 10) ATM an. Ryan Santoso Nomor: 5221 8421 2193 7426.
 - 11) ATM an. M. Sucitra A Nomor: 5221 8421 2193 7418.
 - 12) ATM an. Pangeran S Nomor: 5221 8421 2193 7103.
 - 13) ATM an. Nadiah W Nomor: 5221 8421 2193 7137.
 - 14) ATM an. M. Resky S Nomor: 5221 8421 2193 7467.

Halaman 50 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15) ATM an. Andi Babara Nomor: 5221 8421 2193 7459.
- 16) ATM an. Warsa H Nomor: 5221 8421 2240 4079.
- 17) ATM an. Sri Rahayu Nomor: 5221 8421 2240 4053.
- 18) ATM an. Dwi Rachma A Nomor: 5221 8421 2193 7350.
- 19) ATM an. Abd. Rahman Nomor: 5221 8421 2193 7434.
- 20) ATM an. Agung Januar Nomor: 5221 8421 2193 7525.
- 21) ATM an. Rahmat Wardana Nomor: 5221 8421 0988 9615.
- 22) ATM an. Ahmad Erwin Nomor: 5221 8421 2193 7442.
- 23) ATM an. Dwi Hartini Nomor: 5221 8421 2193 7509.
- 24) ATM an. Nasrul R N Nomor: 5221 8421 2240 4046.
- 25) Rekening Koran Bank BCA an. Agus Ibrahim Nomor Rekening: 5040187253 Bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, , Agustus, September, Oktober, November, Desember 2019, Januari, Februari, Maret 2020.
- 26) Rekening Koran Bank BRI an. Yuni Omega Tanga Nomor Rekening : 341901012162503 Bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2021, Januari, Februari, Maret 2022.
- 27) Rekening Koran Bank BRI an. Yuni Omega Tanga Nomor Rekening : 040301067206508 Bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2021, Januari, Februari, Maret 2022.
- 28) Rekening Koran Bank an. Edy Darmawan Nomor Rekening 040301008981535 Bulan Oktober, November, Desember 2019, Januari, Februari, Maret 2020.
- 29) Rekening Koran Bank Danamon Indonesia an. Try Yulianto Nomor Rekening : 00362553685 Bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2020, Tahun 2021, Januari, Februari, Maret 2022.
- 30) Rekening Koran Bank Mandiri an. Tri Yulianto Nomor Rekening: 1420002293214 Bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2019, Tahun 2020, Tahun 2021.
- 31) Rekening Koran Bank BRI an. Padi Fadillah Nomor Rekening: 039001012943500, Bulan September, Oktober, November, Desember 2020, Januari, Februari, Maret 2021.

Halaman 51 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 32) Rekening Koran Bank Mandiri an. Padi Fadillah Nomor Rekening :700041019709 Bulan September, Oktober, November, Desember 2020, Januari, Februari, Maret 2021.
 - 33) Rekening Koran Bank BCA an. Achmad Tauhid Latif Nomor Rekening: 7890625082 Bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2021.
 - 34) Rekening Koran Bank BRI an. Achmad Tauhid Latif Nomor Rekening: 034301045169504 Bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, Januari, Februari, Maret 2022.
 - 35) Rekening Koran Bank BCA an. Achmad Tauhid Latif No. Rek: 7890625082 Bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2019, Tahun 2020, Tahun 2021.
14. Capture Email dan Wa PT. Basista Teamwork.
 15. Capture Email dan Wa PT. Cahaya Sakti.
 16. Capture Email dan WA PT. Inovasi Global Solusindo.
 17. 1 lembar cek kosong dari Tri Yulianto kepada Hermawati dari PT Cahaya Sakti untuk pembayaran jasa terkait Proyek Pekerjaan Jasa Konsultasi penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Listrik Tenaga Gas PLTG 4 X 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara PT Cahaya Sakti.
 18. Surat Keputusan Direksi PT Surveyor Indonesia SKD-008/DRU-VII/DSDM/2018 tanggal 26 Juli 2018 tentang Mutasi dan Promosi Saudara Tri Yulianto.
 19. Akta Notaris Nomor 11 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Pencabutan dan Pengangkatan Pimpinan Serta Tugas, Wewenang dan Kuasa Kepala Cabang Madya Makassar.
 20. Surat Keputusan Direksi PT Surveyor Indonesia (Persero) Nomor: SKD-003/DRU-IV/DHC/2020 tanggal 28 April 2020 tentang Definitif Saudara Tri Yulianto.
 21. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Surveyor Indonesia (Persero) Nomor :029 tanggal 28 Juni 2011.
 22. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Pernyataan atas nama Tri Yulianto tanggal 8 April 2022.

Halaman 52 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Pernyataan atas nama Asmara Hady tanggal 8 April 2022.
 24. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Pernyataan atas nama Achmad Tauhid Latief tanggal 8 April 2022.
 25. 1 (satu) Lembar daftar Dropping dana proyek PT. Basista Teamwork.
 26. 1 (satu) lembar Daftar Dropping dana proyek PT. Cahaya Sakti.
 27. 1 (satu) lembar daftar Dropping dana proyek PT. Inovasi Global Solusindo Makassar.
 28. 1 (satu) lembar daftar dropping dana proyek PT. Inovasi Global Solusindo Jakarta.
- PT. Basista Teamwork

(Disita dari Agung Pambudi)

29. Rekening Koran Bank BCA an. Agung Pambudi Nomor Rekening: 8803999994 Tahun 2019.
30. Rekening Koran Bank BCA an. Agung Pambudi Nomor Rekening: 8803999994 Tahun 2020.
31. Rekening Koran Bank BCA an. Agung Pambudi Nomor Rekening: 8803999994 Tahun 2021.
32. Rekening koran Bank BRI an. Inovasi Global Solusindo Nomor Rekening :117301000251304 bulan November dan Desember Tahun 2019.
33. Rekening koran Bank BRI an. Inovasi Global Solusindo Nomor Rekening :117301000251304 Tahun 2020.
34. Rekening koran Bank BRI an. Inovasi Global Solusindo Nomor Rekening :117301000251304 Tahun 2021.

(Disita dari Bhascara Rachmanto Sarasin)

35. Rekening koran Bank BRI an. Bhascara Rachmanto S. Nomor Rekening :42701023591503 bulan Oktober, November dan Desember 2019.
36. Rekening koran Bank BRI an. Bhascara Rachmanto S. Nomor Rekening :42701023591503 Tahun 2020.
37. Rekening koran Bank BRI an. Bhascara Rachmanto S. Nomor Rekening :42701023591503 bulan Januari, Februari, Maret dan April 2021.

(Disita dari Hermawati)



38. Keputusan Direksi PT Surveyor Indonesia Nomor SKD-024/DRU-VIII/DHC /2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Saudara Achmad Tauhid Latief Sebagai Pegawai Tetap Perusahaan.
39. Surat Nomor : SPK-029/PKWTT/DHC-VIII/DN/2019 tanggal 01 Agustus 2019 perihal Surat Penawaran Kerja.
40. 1 lembar Memorandum Nomor : MEM-090/DHC-VIII/DN/2019 tanggal 20 Agustus 2019 perihal Surat Keputusan Direksi.
41. Surat Tugas Nomor : SRT-033/SIMAK-X/TY/2019 perihal menugaskan secara penuh kepada Achmad Tauhid Latif sebagai Proyek Manager Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan PT Basista Teamwork.
42. Surat Tugas Nomor : SRT-026A/SIMAK-VIII/TY/2019 perihal menugaskan secara penuh kepada Achmad Tauhid Latif sebagai Proyek Manager Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Listrik Tenaga Gas PLTM 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan.
43. Surat Tugas Nomor : SRT-007A/SIMAK-IV/TY/2019 perihal menugaska secara penuh kepada Achmad Tauhid Latif sebagai Proyek Manager Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Jaringan Utilities FO di Jakarta.
44. Surat Tugas Nomor: SRT-048/SIMAK-XI/TY/2019 perihal menugaskan secara penuh kepada Edy Darman Tenri Sau sebagai Proyek Manager Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic.
45. Surat Nomor : SRT-030/SIMAK-VIII/TY/2019 tanggal 13 Agustus 2019 perihal Surat Penawaran kerja kepada Sdr.Edy Darman Tenri Sau.
46. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu Nomor : PERJ155/ SIMAK/ TYA/111/2019 perihal Perjanjian Kerja antara Tri Yulianto sebagai pihak pertama dan Edy Darman Tenri Sau sebagai pihak kedua.
47. Surat Nomor : SPK-189/SIMAK-IX/HSY/2023 tanggal 12 September 2023 perihal Surat Penawaran Kerja kepada Sdr. Edy Darman tenri Sau.



48. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu Nomor : PERJ-247/SIMAK/HSY/IX/2023 perihal Perjanjian Kerja antara Helmy Satria Yudha sebagai pihak pertama dan Edy Darman Tenri Sau sebagai pihak kedua.
49. Keputusan Direksi PT. Surveyor Indonesia (PERSERO) Nomor : SKD-152/DRU-XI/DHC/2021 tanggal 11 November 2021 tentang Alih Jabatan Saudara Asmara Hady
50. Keputusan Direksi PT. Surveyor Indonesia (Persero) Nomor : SKD-004/DRU-VII/DHC/2020 tanggal 24 Juli 2020 tentang Promosi Saudara Asmara Hady
51. Surat Tugas Nomor : SRT-001/SIMAK-I/TY/2019 perihal menugaskan secara penuh kepada Asmara Hadi sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Bagian Komersial 2 di Cabang Makassar.
- (Disita dari Indra Gumilar Prasetya)**
52. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penawaran Kerjasama Pekerjaan Penyewaan Alat Survey Topografi dan Boring No. 005/22/V/A/SPH/2019 tanggal 22 Mei 2019 senilai Rp.96.500.000,-
53. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penawaran Kerjasama Pekerjaan Penyewaan Alat Survey Topografi dan Boring No. 004/22/V/A/SPH/2019 tanggal 22 Mei 2019 senilai Rp.120.000.000,-.
54. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penawaran Kerjasama Pekerjaan Penyewaan Alat Survey Topografi dan Boring No. 003/22/V/A/SPH/2019 tanggal 22 Mei 2019 senilai Rp.99.200.000,-.
55. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penawaran Kerjasama Pekerjaan Penyewaan Alat Survey Topografi dan Boring No. 002/22/V/A/SPH/2019 tanggal 22 Mei 2019 senilai Rp.100.500.000,-.
56. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penawaran Kerjasama Pekerjaan Penyewaan Alat Survey Topografi dan Boring No. 001/22/V/A/SPH/2019 tanggal 22 Mei 2019 senilai Rp.105.000.000,-.
57. 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice No.: INV.05.05/IGP/SI-MKS/ V/ 2019 tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp.79.375.000,-
58. 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice No.: INV.01.05/IGP/SI-MKS/ V/ 2019 tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp.97.500.000,-

Halaman 55 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59. 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice No : INV.04.05/IGP/SI-MKS/V/ 2019 tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp. 98.700.000,-
60. 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice No : INV.03.05/IGP/SI-MKS/V/ 2019 tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp. 79.500.000,-
61. 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice No : INV.02.05/IGP/SI-MKS/V/ 2019 tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp. 84.000.000,-
62. 1 (satu) rangkap Rekening Tahapan BCA periode Mei 2019 Nomor Rekening 4491399451 an. Indra Gumilar Prasetya.
63. 1 (satu) rangkap Rekening Tahapan BCA periode Juli 2019 Nomor Rekening 4491399451 an. Indra Gumilar Prasetya.
64. 1 (satu) rangkap Bukti Slip Setoran BCA senilai Rp. 245.687.000,-
(Disita dari M. Rijal)
65. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019 nomor polisi: B 1657 FZM warna hitam metalik tanggal 18 Oktober 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
66. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019 nomor polisi: B 1646 FIM warna hitam metalik tanggal 18 Oktober 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
67. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 nomor polisi : B 2957 SZU warna hitam metalik tanggal 18 November 2019 senilai Rp.15.000.000,-.
68. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 nomor polisi : B 1646 FIM warna hitam metalik tanggal 18 November 2019 senilaiRp.15.000.000,-



69. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 nomor polisi : B 2496 KFJ warna putih tanggal 18 November 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
70. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 nomor polisi : KT 1741 ZW warna abu-abu metalik tanggal 18 November 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
71. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 nomor polisi : KT 1766 K warna abu-abu metalik tanggal 18 November 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
72. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 nomor polisi : B 1657 FZM warna hitam metalik tanggal 18 November 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
73. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 nomor polisi : KT 1741 ZW warna abu-abu metalik tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
74. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 nomor polisi : B 2496 KFJ warna putih tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.



75. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 nomor polisi :KT 1766 K warna abu-abu metalik tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
76. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 nomor polisi : B 1657 FZM warna hitam metalik tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
77. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 nomor polisi : B 1646 FIM warna hitam metalik tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
78. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 nomor polisi : B 2957 SZU warna putih tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
79. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 nomor polisi : KT 1741 ZW warna abu-abu metalik tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
80. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 nomor polisi : KT 1766 K warna abu-abu metalik tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.



81. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 nomor polisi : B 2957 SZU warna hitam metalik tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
82. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 nomor polisi : B 1657 FZM warna hitam metalik tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
83. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 nomor polisi : B 1646 FIM warna hitam metalik tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
84. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 nomor polisi : B 1657 FZM warna hitam metalik tanggal 17 Maret 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
85. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 nomor polisi : B 2957 SZU warna hitam metalik tanggal 17 Maret 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
86. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 nomor polisi : B 1646 FIM warna hitam metalik tanggal 17 Maret 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
87. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 nomor polisi : KT

Halaman 59 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1766 K warna abu-abu metalik tanggal 17 Maret 2020 senilai Rp.15.000.000,-.

88. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 nomor polisi : B 2496 KFJ warna putih tanggal 17 Maret 2020 senilai Rp.15.000.000,-.
89. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 nomor polisi : KT 1741 ZW warna abu-abu metalik tanggal 17 Maret 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
90. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 nomor polisi: B 2957 SZU warna hitam metalik tanggal 17 Mei 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
91. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 nomor polisi B 1657 FZM warna hitam metalik tanggal 17 Mei 2020 senilai Rp. 15.000.000,-
92. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 nomor polisi: B 1646 FIM warna hitam metalik tanggal 17 Mei 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
93. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 nomor polisi: KT 1741 ZW warna abu-abu metalik tanggal 17 Mei 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
94. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah

Halaman 60 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020 nomor polisi: B 2496 KFJ warna putih tanggal 17 Juni 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.

95. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020 nomor polisi: B 2957 SZU warna hitam metalik tanggal 17 Juni 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.

96. 4 lembar Screenshoot bukti transfer.

(Disita dari M. Ridho Umbaran)

97. 1 bundel dokumen Permohonan Pengembalian Dana Nomor 085/Law/MHM/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Pengembalian Dana.

98. 1 lembar cek BNI untuk Nomor Rekening : 0101466749 an. BasistaTeamwork sejumlah Rp. 325.000.000,- tanggal 30 September 2020.

99. 1 lembar cek BRI Sejumlah Rp. 210.000.000,- tanggal 24 Juli 2020

100. Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 26 Oktober 2020 (Bank BNI).

101. 1 lembar Kwitansi dari M. Ridho Umbaran sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran biasa pengurusan administrasi pengajuan kredit ke Bank Swasta atas nama PT. Cahaya Sakti.

102. 1 lembar invoice tanggal 13 Juli 2020 kuitansi nomor : A004-CS (telah diterima oleh PT. Cahaya Sakti dari Bp. M. Ridho Umbaran.

103. Rekening koran Bank Bri an. Titin Dwi Tyasti Nomor Rekening 324801016125536 bulan Juli, September, November dan Desember 2019 Tahun 2020.

104. Rekening Koran Bank BRI an. M. Ridho Umbaran Nomor Rekening: 120901002802500 bulan Desember 2019, Tahun 2020, dan Januari 2021.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Achmad Tauhid Latif.

(Disita dari Agus Ibrahim)

105. Uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Agung Pambudi.

Halaman 61 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS



(Disita dari Dian Vita Juliastanti)

106. Uang tunai sebesar Rp. 12.835.500,- (dua belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Agung Pambudi.(Disita dari Jhonson Lumbatoruan)

107. Uang tunai sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Agung Pambudi dan Terdakwa I Fachrul Madin.

(Disita dari M.Rijal)

108. Uang tunai sebesar Rp. 17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa I Fachrul Madin.

(Disita dari Pedi Fadillah)

109. Uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa I Fachrul Madin.

(Disita dari Jasi Ekarini)

110. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 269 atas nama Tri Yulianto.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Achmad Tauhid Latif.

(Disita dari Yuanito Bayu Ardi Sasongko)

111. Rekening koran Bank BRI an. Nur Multazam Nurdin Nomor Rekening: 040301031999507 bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2020, Tahun 2021, bulan Januari, Februari, dan Maret tahun 2022.

112. Rekening koran Bank BRI an. Asmara Hady Nomor Rekening 448001010041533 bulan September, Oktober, November, Desember Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, bulan Januari, Februari dan Maret tahun 2022.

113. Rekening koran Bank BCA an. Asmara Hady Nomor Rekening : 2900269709 bulan Juli, September, Oktober, November, Desember 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, bulan Januari dan Februari 2022.

Halaman 62 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS



114. Rekening koran Bank Mandiri an. Asmara Hady Nomor Rekening : 1490003036573 bulan September tahun 2021.
115. Rekening koran Bank BRI an. Leopold Indra AL Nomor Rekening : 040301047712503 bulan Oktober, November, Desember tahun 2020, Tahun 2021, bulan Januari, Februari, dan Maret tahun 2022.
116. Rekening koran Bank BRI an. Leopold Indra AL Nomor Rekening : 729001000336530 bulan Oktober, November, Desember, Tahun 2021, bulan Januari, Februari, Maret tahun 2022.
117. Rekening koran Bank BRI an. A. Gita Gandrika Muc Nomor Rekening: 358201036884536 bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember tahun 2019, Tahun 2021, Tahun 2021, bulan Januari, Februari, Maret 2022.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Achmad Tauhid Latif.

(Disita dari indra Gumilar Prasetya)

118. Uang tunai sebesar Rp. 9.766.000,- (sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Agung Pambudi.

(Disita dari Zulkifli)

119. Uang tunai sebesar Rp. 70.600.000,- (tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah).

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa I Fachrul Madin.

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/ PN. Mks yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks. Tanggal 29 Juli 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks yang menerangkan bahwa



permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 07 Agustus 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/ PN. Mks yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks. Tanggal 29 Juli 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 5 Agustus 2024 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Agustus 2024;

Membaca Memori Banding tertanggal 20 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 Agustus 2024 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Agustus 2024, sesuai Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 42/Pid.Sus-Tpk/2024/PN. Mks tanggal 26 Agustus 2024;

Membaca kontra Memori Banding tertanggal 06 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 September 2024 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 September 2024;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Juli 2024 dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, selanjutnya permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diajukan tanggal 5 Agustus 2024, dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-



undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa membaca dan memperhatikan jenis dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk subsidairitas, di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam memeriksa dan memutus perkara incasu telah dilakukan secara tertib. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar memeriksa, mengadili dan memutus dakwaan Primair terlebih dahulu, dengan demikian telah bersesuaian dengan Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung dan Surat Edaran MA RI Nomor 07 Tahun 2012 Jo SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014 Jo SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018 serta lampirannya, dimana yang harus diperiksa, diadili dan diputus terlebih dahulu adalah dakwaan primair dan oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair. Karena hal tersebut telah dilakukan dengan tertib dan benar oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, maka tata cara pemeriksaan tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar dalam tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tidak sependapat dengan pertimbangan berdasar fakta persidangan yang dikonstruksi dari keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti terhadap kualifikasi delik yang dianggap terbukti maupun straffmaat yang dijatuhkan pengadilan di tingkat pertama berdasar alasan serta pertimbangan hukum sebagai berikut :

Alasan fakta yuridis :

1. Perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT. Basista Teamwork yang mengadakan perjanjian kerja sama dengan PT.SIMAK (dimana direktur Tri Yulianto yang merupakan Kepala Surveyor Indonesia Cabang Makassar) Nomor :KP/-099/BSTA8/X/JKT 2019 yo Nomor:PERJ-001/SIMAK-XX/TY/2019 tgl.28-Oktober-2019; bukan merupakan perbuatan melawan hukum formil sebagaimana unsur pada dakwaan primair,oleh karena dilakukan antar badan usaha yang bersifat kontraktual;
2. Perbuatan Tri Yulianto selaku Kepala Cabang Surveyor Indonesia Makassar sekaligus merangkap sebagai direktur PT.SIMAK yang mengajukan anggaran RAB kepada Surveyor

Halaman 65 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS



Pusat, diluar kewenangan Terdakwa selaku pihak dari PT.Basista Teamwork:

3. Terjadinya penggunaan anggaran oleh PT.Surveyor Indonesia Cabang Makassar yang tidak sesuai core bisnisnya, melainkan untuk kepentingan para pihak dalam perjanjian yang tidak terbatas pada PT Basista Teamwork (terdakwa Muhammad Ridho Umbaran) senyatanya adalah perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Tri Yulianto;
4. Peran Terdakwa Muhamad Ridho Umbaran selaku direktur PT Basista Teamwork bersama terdakwa lainnya,yang meminjamkan bendera perusahaan,hanya pelaku turut serta dari penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh PT.Surveyor Indonesia Cabang Makassar;
5. Secara faktual unsur sengaja sebagai kepastian untuk memperkaya diri sendiri secara inkonkrito sejak awal tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa selaku direktur PT.Basista Teamwork, “mengingat dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan terdakwa pembagian keuntungan adalah hal wajar dalam praktek bisnis antar badan usaha” ,akan tetapi masalah pendanaan yang menggunakan anggaran BUMN/anak perusahaan BUMN, diluar bisnis utamanya in cassu PT.Surveyor Indonesia Cabang Makassar terkualifisir sebagai perbuatan yang diluar kewenangannya yang lebih tepat dikualifisir sebagaimana unsur utama (bestandel delict) pada dakwaan subsidair in litis;
6. Terdakwa Muhammad Ridho Umbaran didakwa dengan dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Subsidair pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 66 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana , yaitu Terdakwa Muhammad Ridho Umbaran selaku Direktur PT Basista Team Work bersama-sama dengan Tri Yulianto selaku Kepala Cabang PT. Surveyor Indonesia di Makassar (BUMN) dan Achmad Tauhid Latif selaku Junior Administration Operation Office PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar merekayasa dan memanipulasi dokumen seolah-olah pekerjaan atau proyek yang dilaksanakan oleh PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar telah sesuai dengan kegiatan usaha PT. Surveyor Indonesia yaitu pemberian jasa pengawasan, konsultasi atau pendampingan, namun faktanya pekerjaan yang dilaksanakan semata-mata hanya merupakan kegiatan pendanaan PT. Basista Team Work sehingga pekerjaan fisik tersebut dikategorikan sebagai pekerjaan fiktif ;

7. Berdasarkan dokumen yang direkayasa oleh Terdakwa Muhammad Ridho Umbaran bersama-sama dengan Tri Yulianto dan Achmad Tauhid Latif, PT. Surveyor Indonesia telah melakukan dropping dana kepada PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar untuk membiayai proyek/pekerjaan fiktif tersebut ;
8. Berdasarkan fakta tersebut diatas Tri Yulianto dinyatakan terbukti menyalahgunakan kewenangan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sesuai putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks tanggal 29 Juli 2024, demikian pula Achmad Tauhid Latif dinyatakan terbukti menyalahgunakan kewenangan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sesuai putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks tanggal 29 Juli 2024 ;
9. Oleh karena Tri Yulianto dan Achmad Tauhid Latif terbukti menyalahgunakan kewenangan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa Muhammad Ridho Umbaran diuntokan ke pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka terdakwa Muhammad Ridho Umbaran masuk dalam kategori Turut Serta menyalahgunakan kewenangan sebagaimana

Halaman 67 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS



didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa Muhammad Ridho Umbaran dalam dakwaan Subsidair;

10. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa Muhammad Ridho Umbaran tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut serta menyatakan terdakwa Muhammad Ridho Umbaran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;

Mengenai pemidanaan Pengadilan Tinggi sebagai yudex factie berpendapat dari sudut PERMA No.1 Tahun 2020 derajat kesalahan terdakwa Direktur Utama PT Basista Teamwork ataupun keuntungan yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp. 4.009.100.580,00 (Empat milyar sembilan juta seratus ribu lima ratus delapan puluh Rupiah) termasuk kategori sedang derajat kesalahan ringan, dampaknya bersifat lokal;

Alasan sosiologis;

- Perbuatan terdakwa merupakan dampak perbuatan fiktif dan manipulatif pada pendanaan yang tidak termasuk pada usaha utama perusahaan PT Surveyer Indonesia Cabang Makassar;

Alasan filosofis;

- Ditinjau dari segi filosofi hukum yang menegaskan bahwa “Pemberian Keadilan” sebagai tugas pokok Lembaga Peradilan tidaklah identik dengan “putusan yang faktual tentang pekerjaan/Proyek fiktif tidak selalu menghukum” (The Court of Justice not the court of punishment) maka korelasi positif antara perbuatan terdakwa sebagai pelaku yang menikmati hasil korupsi maka keadilan proporsional dalam pemidanaan haruslah diterapkan secara setimpal atas diri terdakwa hal mana telah tercermin pada putusan yang akan dijatuhkan di tingkat banding;

Menimbang sebelum Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan di tingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkannya memori banding Penasihat Hukum/Terdakwa tertanggal.20 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengenai analisis tentang pekerjaan/proyek fiktif oleh PT.Surveyer Indonesia Cabang Makassar diinisiasi berdasar perjanjian antara

Halaman 68 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS



- PT.Basista dengan PT.Simak tidak relevant untuk mengesampingkan peran terdakwa sebagai pelaku turut serta yang menikmati keuntungan, karenanya argument tersebut patut dikesampingkan;
2. Keberatan mengenai kedudukan hukum PT.Surveyer Indonesia sebagai badan usaha tidak relevan terkait kualitas Terdakwa (PT.Basista teamwork) oleh karena sangat tidak logis jika PT.Surveyer Indonesia sebagai BUMN tidak menerima fasilitas dari negara karenanya sebagai anak perusahaan BUMN yang tidak terdapat penyertaan modal swasta termasuk mutatis mutandis adalah perusahaan negara dengan status BUMN;
 3. Keberatan mengenai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama sepanjang mengenai kualifikasi perbuatan Terdakwa dalam konteks dakwaan primair telah dipertimbangkan oleh yudex factie di tingkat banding, sehingga keberatan mengenai terbukti atau tidaknya mengenai unsur-unsur selebihnya harus ditolak;
 4. Keberatan mengenai pasal.3 aturan perusahaan secara faktual telah disalah gunakan untuk kegiatan yang tidak termasuk core bussines PT.Surveyer Indonesia Cabang Makassar melainkan untuk pembiayaan kepentingan eksekusi tanah yang jelas melanggar azas fiduciary of duty dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas akibat penyalahgunaan wewenang oleh direksi aquo;
- Berdasarkan pertimbangan tersebut memori banding Penasihat Hukum/Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga patut pula dikesampingkan seluruhnya.

Menimbang bahwa kontra Memori Banding Penuntut Umum yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 12 September 2024 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makasssar berpendapat secara substansial kontra Memori Banding aquo tidak sependapat terhadap alasan yuridis dan fakta tentang pembuktian yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa in casu. Terhadap Kontra Memori Banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makasssar berpendapat bahwa konstruksi dakwaan yang terbukti serta straffmaat (pidanaaan) telah dipertimbangkan seluruhnya oleh yudex facti tingkat banding, karena hal-hal sepanjang kontra Memori Banding selebihnya tidak berdasar hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks tanggal tanggal 29 Juli 2024

Halaman 69 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS



tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Makassar mengadili sendiri seperti tersebut di bawah;

Menimbang sebelum pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara;
- Terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa menurut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 46



Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 29 Juli 2024 Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RIDHO UMBARAN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMAD RIDHO UMBARAN, oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RIDHO UMBARAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMAD RIDHO UMBARAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan;
5. Menghukum terdakwa MUHAMAD RIDHO UMBARAN untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 4.009.100.580,00 (Empat milyar sembilan juta seratus ribu lima ratus delapan puluh Rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana secara proporsional dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa MUHAMAD RIDHO UMBARAN dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa MUHAMAD RIDHO UMBARAN tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

Dokumen dari PT. Basista Teamwork:

Halaman 71 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Prosedur Perolehan Proyek P-PROYEK-01

A. Penerimaan Info Potensi Proyek

- 1) Surat Permintaan Penawaran dari PT. Basista Teamwork (BOQ, RKS dan Surat Undangan) No. ST/I-009A/II1/2019 Tanggal 13 September 2019.
- 2) Form FP-Proyek01-01 Form Kajian Resiko Tahap Pemasaran Tanggal 28 Agustus 2019.

B. Pertimbangan Menggunakan Mitra Bisnis

- 1) Form FP-Proyek01-02 Kajian Mitra Bisnis (tidak ada)

C. Proses Tender

- 1) Form FP-Proyek01-03 Form Pemeriksaan Tender Tanggal 23 September 2019.
- 2) Surat Balasan Permintaan Penawaran (PTSI) No. PH-013/SIMAK-IX/TY/2019 Tanggal 21 September 2019.
- 3) Undangan Negosiasi No. ST/BST/UN-010/IX/2019 Tanggal 23 September 2019.
- 4) Berita Acara Negosiasi No. ST/BST/BAN-010/IX/2019 Tanggal 25 September 2019.

D. Proses Kontrak

- 1) Permohonan Legal Review Draft Kontrak No. MEM- 006/SIMAK-X/TY/2019 Tanggal 14 Oktober 2019.
- 2) Hasil Legal Review Draft Kontrak No. MEM-052/SP-X/RSO/2019 Tanggal 17 Oktober 2019.
- 3) Form FP-Proyek01-04 Pemeriksaan isi Kontrak Tanggal 11 Oktober 2019.
- 4) SPK Kontrak Final Tanda tangan No. KP-099/BST-A8/X/JKT/2019.

2. Prosedur Persiapan Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-02

A. Pembentukan Tim/Penanggungjawab Proyek

- 1) Proyek FP-Proyek02-01 Surat Penunjukan Tim Tanggal 30 September 2019.
- 2) Notulen Tentang Ruang Lingkup Pekerjaan (tidak ada)
- 3) Proyek FP-Proyek02-02 Kriteria Tinjauan Ulang Kontrak Tanggal 28 Oktober 2019.
- 4) Notulen Rapat Pembahasan Awal Kontrak (tidak ada)

B. Kajian Resiko Proyek & K3LL

Halaman 72 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Proyek FP-Proyek02-03 Formulir Monitoring Mutu & K3LL
Tanggal 30 September 2019

C. Pembuatan dan Persetujuan Rencana Anggaran dan Biaya Proyek (RAB Proyek)

- 1) Pembuatan Draft RAB Proyek dan Permohonan Persetujuan RAB
Tanggal 07 November 2019 No. MEM-003/SIMAK-XI/ TY/2019
- 2) Persetujuan Penandatanganan RAB Proyek Tanggal 19
November 2019.

D. Penyiapan Sumber Daya Manusia

- 1) Penyiapan Sumber Daya Manusia (tidak ada)
- 2) Daftar Tenaga Yang dibutuhkan (tidak ada)
- 3) Proses Rekrutmen Tenaga Pelaksana

E. Penyusunan Prosedur Pelaksanaan Proyek

- 1) Penyusunan Prosedur Pelaksanaan Proyek yang telah disetujui
(tidak ada)

F. Pembuatan Skedul Kerja

- 1) Pembuatan Skedul Kerja ditandatangani Kepala MP (tidak ada)
- 2) Kurva S (tidak ada)

G. Penyiapan Alat Operasi, Subkon dan Perlengkapan K3

- 1) Penyiapan Alat Operasi, Subcont (tidak ada)

H. Pelaksanaan Kickoff Meeting

I. Pelaksanaan Kickoff Meeting (tidak ada)

3. Prosedur Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-03

A. Pelaksanaan Proyek

- 1) Notulen Sosialisasi Tahapan Pekerjaan, Prosedur dan Skedul
yang telah ditetapkan kepada seluruh pelaksana proyek (tidak
ada)
- 2) Progress Kemajuan Proyek dalam ASMOP (tidak ada)
- 3) MK3LL Proyek atau MR melaksanakan Pengendalian
Pemantauan Resiko Berdasarkan FORM FP-Proyek02-02 (tidak
ada)

B. Pendanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan

- 1) Untuk Pendanaan Proyek mengikuti kebijakan dan Prosedur
Aangaran (P-DKA-01) dari DKA (tidak ada).
- 2) Permohonan Droning November 2019 No. MEM-006/SIMAK-
XI/TY/2019 Tanggal 18 November 2019.



- 3) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-051/SBINFRAS-XI/HW/2019 Tanggal 26 November 2019.
- 4) Permohonan Dropping Desember 2019 No. MEM-016/SIMAK-XII/TY/2019 Tanggal 12 Desember 2019.
- 5) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-004/SBINFRAS-XII/HW/2019 Tanggal 19 Desember 2019.
- 6) Permohonan Dropping Januari 2020 No. MEM-094/SIMAK-I/TY/2020 Tanggal 22 Januari 2020.
- 7) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-263/SBINFRAS-I/HW/2020 Tanggal 27 Januari 2020.
- 8) Permohonan Dropping Maret 2020 No. MEM-093/SIMAK-III/TY/2020 Tanggal 13 Maret 2020.
- 9) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Maret 2020 No. ND-022/DKA-III/YS/2020 Tanggal 22 Maret 2020.
- 10) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Maret 2020 No. ND-001/SIMAK-IV/TY/2020 Tanggal 8 April 2020.
- 11) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Maret Tahap II No. ND-025/DKA-IV/YS/2020 Tanggal 16 April 2020.
- 12) Permohonan Dropping April 2020 No. MEM-041/SIMAK-IV/TY/2020 Tanggal 09 April 2020.
- 13) Permohonan Persetujuan Dropping Khusus Cabang Makassar Bulan April 2020 No. ND-006/DKA-V/YS/2020 Tanggal 06 Mei 2020.
- 14) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan April Tahap II No. ND-015/D KA-V/YS/2020 Tanggal 12 Mei 2020.
- 15) Permohonan Dropping Mei 2020 No. MEM-046/SIMAK-V/TY/2020 Tanggal 11 Mei 2020.
- 16) Permohonan Dropping Mei 2020 No. MEM-205/SBINFRAS-V/HW/2020 Tanggal 19 Mei 2020.



- 17) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Mei 2020 Tahap I No. ND-034/DKA-V/YS/2020 Tanggal 20 Mei 2020.
- 18) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Mei 2020 Tahap II No. ND-017/DKA-VI/YS/2020 Tanggal 09 Juni 2020.
- 19) Permohonan Dropping Juni 2020 No. MEM-144/SIMAK-VII/ TY/ 2020 Tanggal 19 Juni 2020.
- 20) Permohonan Dropping Mei 2020 No. MEM-323/SBINFRAS-VI/HW/ 2020 Tanggal 26 Juni 2020.
- 21) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Juni 2020 Tahap I No. ND-052/DKA-VI/YS/2020 Tanggal 30 Juni 2020.
- 22) Permohonan Dropping Juli 2020 No. MEM-123/SIMAK-VII/TY/2020 Tanggal 17 Juli 2020.
- 23) Permohonan Dropping Juli 2020 No. MEM-383/SBINFRAS-VII/HW/2020 Tanggal 20 Juli 2020.
- 24) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Juni 2020 Tahap I No. ND-047/DKA-VII/YS/2020 Tanggal 22 Juli 2020.
- 25) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Juli 2020 Tahap II No. ND-007/DKA-VIII/YS/2020 Tanggal 06 Agustus 2020.
- 26) Permohonan Dropping Agustus 2020 No. MEM-111/SIMAK-VIII/ TY/2020 Tanggal 17 Agustus 2020.
- 27) Permohonan Dropping Agustus 2020 No. MEM-273/SBINFRAS-VIII/HW/2020 Tanggal 19 Agustus 2020.
- 28) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Agustus 2020 Tahap I No. ND-036/DKA-VIII/YS/2020 Tanggal 25 Agustus 2020.
- 29) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Agustus 2020 Tahap II No. MD-034/DKA-IX/YS/2020 Tanggal 15 September 2020.
- 30) Permohonan Dropping September 2020 No. ND-001/SIMAK-IX/ TY/2020 Tanggal 21 September 2020.
- 31) Permohonan Dropping September 2020 No. MEM-080/SIMAK-IX/ TY/2020 Tanggal 11 September 2020.

Halaman 75 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 32) Permohonan Draping September 2020 No.MEM-151/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 21 September 2020.
- 33) Permohonan Draping September 2020 No. MEM-451/SBINFRAS-IX/HW/2020 Tanggal 23 September 2020.
- 34) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan September 2020 Tahap I No. ND-001/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 21 September 2020.
- 35) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan September 2020 Tahap I No. ND-059/DKA-IX/YS/2020 Tanggal 23 September 2020.
- 36) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan September 2020 Tahap 2 NO. ND-018/DKA-X/YS/2020 Tanggal 12 Oktober 2020.
- 37) Permohonan Dropping Oktober 2020 No. MEM-036/SIMAK-XI/TY/2020 Tanggal 6 Oktober 2020.
- 38) Permohonan Dropping Oktober 2020 No. MEM-159/SIMAK-XI/TY/2020 Tanggal 21 Oktober 2020.
- 39) Permohonan Dropping Oktober 2020 No. MEM-306/SBINFRAS-XI/HW Tanggal 19 Oktober 2020/2020.
- 40) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Oktober 2020 Tahap I No.ND-036/DKA-X/YS/2020 Tanggal 06 Oktober 2020.
- 41) Permohonan Dropping November 2020 No. MEM-097/SIMAK-XI/TY/2020 Tanggal 13 November 2020.
- 42) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Oktober 2020 Tahap II No. ND-027/DKA-XI/YS/2020 Tanggal 16 November 2020.
- 43) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan November 2020 Tahap I No.ND-046/DKA-XI/YS/2020 Tanggal 25 November 2020.
- 44) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan November 2020 Tahap II No. ND-025/DKA-XII/YS/2020 Tanggal 11 Desember 2020.
- 45) Daftar Uang Muka Operasional, Pengajuan dan PJUM
- 46) List Pengajuan Uang Muka
- 47) Daftar Penggajian Personil
- 48) List Penggajian Personil

Halaman 76 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 49) List Penyewaan
- 50) List Penyewaan
- 51) List Perjalanan Dinas
- 52) List Perjalanan Dinas

C. Pemantauan Kemajuan Proyek

- 1) MK3LL Proyek atau MR melaksanakan Pengendalian Pemantauan Resiko Memastikan Para Pelaksana dan Subcon menjalankan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan IK (tidak ada)
- 2) Monitoring Progress Kemajuan Proyek dalam ASMOP (tidak ada)

D. Pemantauan Pengendalian Resiko sesuai dengan Matriks Respon Resiko

- 1) Pengendali MK3LL memantau resiko (tidak ada)

E. Pembuatan Laporan Hasil Pekerjaan

- 1) Laporan Tahap 1 (tidak ada)
- 2) Laporan Tahap 2 (tidak ada)
- 3) Laporan Tahap 3 (tidak ada)
- 4) Laporan Tahap 4 (tidak ada)

F. Penyerahan Laporan dan Berita Acara Serah Terima

- 1) BAPP Tahap 1 No.BAPP 006/SIMAK-III/TY/2020 Tanggal 11 Maret 2020
- 2) BAPP Tahap 2 No.BAPP 029/SIMAK-IX/TY/2020 Tanggal 29 September 2020.
- 3) BAPP Tahap 3 No. BAPP 175/SIMAK-XII/TY/2021 Tanggal 06 Desember 2021

G. Pembuatan Invoice

- 1) Admin Membuat PPI sesuai dengan Prosedur Keuangan (PDKA-04)
 - a. Surat permohonan pembayaran termin 1 No. SRT-081/SIMAK-XI/TY/2020 Tanggal 30 November 2020 dan PPI dan Invoice Tahap 1 No. INV-0243/MK-11/TY/20 Tanggal 30 November 2020
 - b. Surat permohonan pembayaran termin 2 No. SRT-026/SIMAK-III/TY/2019 Tanggal 31 Maret 2021 dan PPI dan Invoice Tahap 2 No. INV-0087/MK-03-TY/21 Tanggal 31 Maret 2021
 - c. Surat permohonan pembayaran termin 3 No. SRT-013/SIMAK-VII/HSY/2022 Tanggal 29 Juli 2022 dan PPI dan Invoice Tahap 3 No. INV-1411/MK-07-HS/22 Tanggal 29 Juli 2022

Halaman 77 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1-1 No. SRT-015/SIMAK-VI/TY/2020 Tanggal 24 Juni 2020
- e. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1-2 No. SRT-062/SIMAK-III/TY/2021 Tanggal 31 Maret 2021
- f. Surat Teguran SRT-050/SIMAK-IV/TY/2021 Tanggal 26 April 2021
- g. Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar & Cek

H. Pengakhiran Proyek

Dokumen dari PT Cahaya Sakti :

4. Prosedur Perolehan Proyek P-PROYEK-01

A. Penerimaan Info Potensi Proyek

- 1) Surat Permintaan Penawaran dari PT Cahaya Sakti No. 0708/adm A/II/19 Tanggal 29 Juli 2019 (Scan)
- 2) Form FP-Proyek01-01 Kajian Resiko Tahap Pemasaran Tanggal 12 Agustus 2019

B. Pertimbangan Menggunakan Mitra Bisnis

- 1) Form FP-Proyek01-02 Kajian Mitra Bisnis (tidak ada)

C. Proses Tender

- 1) Form FP-Proyek01-03 Form Pemeriksaan Tender (tidak ada)
- 2) Surat Balasan Penawaran (PTSI) No. PH-003/SIMAK-VIII/ TY/ 2019 Tanggal 05 Agustus 2019
- 3) Surat Konfirmasi Penawaran (PT Cahaya Sakti) No. 0709/ adm/ CS-SI/VIII/2019 Tanggal 07 Agustus 2019

D. Proses Kontrak

- 1) Permohonan Legal Review Draft Kontrak No. MEM- 003/ S1MAKA/III/TY/2019 Tanggal 12 Agustus 2019
- 2) Hasil Legal Review Draft Kontrak No. MEM-046/SP-VIII/ MOD/2019 Tanggal 15 Agustus 2019
- 3) Form FP-Proyek01-04 Pemeriksaan isi Kontrak (tidak ada)
- 4) SPK Kontrak Final Tanda tangan No. PERJ-001/SIMAK-VIII/ TY/2019 Tanggal 02 Agustus 2019

5. Prosedur Persiapan Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-02

A. Pembentukan Tim/Penanggungjawab Proyek

- 1) Proyek FP-Proyek02-01 Surat Penunjukan Tim (tidak ada)
- 2) Notulen Tentang Ruang Lingkup Pekerjaan (tidak ada)
- 3) Proyek FP-Proyek02-02 Kriteria Tinjauan Ulang Kontrak Tanggal 29 Agustus 2019

Halaman 78 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS



- 4) Notulen Rapat Pembahasan Awal Kontrak (tidak ada)

B. Kajian Resiko Proyek & K3LL

- 1) Proyek FP-Proyek02-03 Formulir Monitoring Mutu & K3LL (tidak ada)

C. Pembuatan dan Persetujuan Rencana Anggaran dan Biaya Proyek (RAB Proyek)

- 1) Pembuatan Draft RAB Proyek dan Permohonan Persetujuan RAB No. MEM-002/SIMAK-IX/TY/2019 Tanggal 04 September 2019
- 2) Persetujuan Penandatanganan RAB Proyek Tanggal 16 Mei 2019 (tidak ada)

D. Penyiapan Sumber Daya Manusia

- 1) Perjanjian Kerja Personil Proyek

E. Penyusunan Prosedur Pelaksanaan Proyek

- 1) Penyusunan Prosedur Pelaksanaan Proyek yang telah disetujui

F. Pembuatan Skedul Kerja

- 1) Pembuatan Skedul Kerja ditandatangani Kepala MP (tidak ada)
- 2) Kurva S (tidak ada)

G. Penyiapan Alat Operasi, Subkon dan Perlengkapan K3

- 1) Penyiapan Alat Operasi, Subcon (tidak ada)

H. Pelaksanaan Kickoff Meeting

- 1) Pelaksanaan Kickoff Meeting (tidak ada)

6. Prosedur Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-03

A. Pelaksanaan Proyek

- 1) Notulen Sosialisasi Tahapan Pekerjaan, Prosedur dan Skedul yang telah ditetapkan kepada seluruh pelaksana proyek (tidak ada)
- 2) Progress Kemajuan Proyek dalam ASMOP (tidak ada)
- 3) MK3LL Proyek atau MR melaksanakan Pengendalian Pemantauan Resiko Berdasarkan FORM FP-Proyek02-02 (tidak ada)

B. Pendanaan dan Pertanggung Jawaban Penggunaan

- 1) Untuk Pendanaan Proyek mengikuti kebijakan dan Prosedur Anggaran (P-DKA-01) dari DKA (tidak ada)
- 2) Permohonan Draping Agustus 2019 No. MEM-014/SIMAK-VIII/TY/2019 Tanggal 20 Agustus 2019



- 3) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-014/SBINFRAS-VIII/HU/2019 Tanggal 23 Agustus 2019 (tidak ada)
- 4) Permohonan Draping Khusus No. ND-017/SIMAK-IX/TY/2019 Tanggal 06 September 2019
- 5) Permohonan Draping September 2019 No. MEM-008/SIMAK-IX/TY/2019 Tanggal 20 September 2019
- 6) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-014/SBINFRAS-IX/HW/2019 Tanggal 23 September 2019
- 7) Permohonan Draping Oktober 2019 No. MEM-009/SIMAK-X/TY/2019 Tanggal 21 Oktober 2019
- 8) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-010/SBINFRS-X/HW/2019 Tanggal 24 Oktober 2019
- 9) Permohonan Draping Desember 2019 NO. MEM-016/SIMAK-XII/TY/2019 Tanggal 12 Desember 2019
- 10) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-004/SBINFRAS-XII/HU/2019 Tanggal 19 Desember 2019
- 11) Permohonan Draping Januari 2020 No. MEM-094/SIMAK-I/TY/2020 Tanggal 22 Januari 2020
- 12) Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-263/SBINFRAS-I/HW/2020 Tanggal 27 Januari 2020
- 13) Permohonan Draping Maret 2020 No. MEM-093/SIMAK-III/TY/2020 Tanggal 13 Maret 2020
- 14) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Maret 2020 No. ND-022/DKA-III/YS/2020 Tanggal 22 Maret 2020
- 15) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar Bulan Maret Tahap II No. ND-025/DKA-IV/YS/2020 Tanggal 16 April 2020
- 16) Permohonan Draping April 2020 No MEM-041/SIMA IV/TY/2020 Tanggal 09 April 2020

Halaman 80 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 17) Permohonan Persetujuan Dropping Khusus Cabang Makassar
Bulan April 2020 No. ND-006/DKA-V/YS/2020 Tanggal 06 Mei
2020
- 18) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar
Bulan April Tahap II ND-015/DKA-V/YS/2020 Tanggal 12 Mei
2020
- 19) Permohonan Draping Mei 2020 No. MEM-046/SIMAK-V/TY/2020
Tanggal 11 Mei 2020
- 20) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar
Bulan Mei 2020 Tahap I No. ND-034/DKA-V/YS/2020 Tanggal 20
Mei 2020
- 21) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar
Bulan Mei 2020 Tahap II No. ND-017/DKA-VI/YS/2020 Tanggal
09 Juni 2020
- 22) Permohonan Draping Juni 2020 No. MEM-144/SIMAK-
VI/TY/2020 Tanggal 19 Juni 2020
- 23) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar
Bulan Juni 2020 Tahap I No. ND-052/DKA-VI/YS/2020 Tanggal
30 Juni 2020
- 24) Permohonan Draping Juli 2020 No. MEM-123/SIMAK-
VII/TY/2020 Tanggal 17 Juli 2020
- 25) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar
Bulan Juni 2020 Tahap I No. ND-047/DKA-VII/YS/2020 Tanggal
22 Juli 2020
- 26) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar
Bulan Juli 2020 Tahap II No. ND-007/DKA-VIII/YS/2020 Tanggal
06 Agustus 2020
- 27) Permohonan Dropping Agustus 2020 No. MEM-111/SIMAK-VIII/
TY/2020 Tanggal 17 Agustus 2020
- 28) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar
Bulan Agustus 2020 Tahap I No. ND-036/DKA-VIII/YS/2020
Tanggal 25 Agustus 2020
- 29) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar
Bulan Agustus 2020 Tahap II No. ND-034/DKA-IX/YS/2020
Tanggal 15 September 2020
- 30) Permohonan Dropping September 2020 No. MEM-151/SIMAK-
IX/TY/2020 Tanggal 21 September 2020

Halaman 81 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 31) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar
Bulan September 2020 Tahap 1 No. ND-059/DKA-IX/YS/2020
Tanggal 23 September 2020
- 32) Permohonan Persetujuan Dropping Cabang Madya Makassar
Bulan September 2020 Tahap 2 No. ND-018/DKA-X/YS/2020
Tanggal 12 Oktober 2020
- 33) Daftar Uang Muka Operasional, Pengajuan dan PJUM
- 34) List Pengajuan Uang Muka
- 35) Daftar Penggajian Personil
- 36) List Penggajian Personil
- 37) Daftar Penyewaan kendaraan
- 37) List Penyewaan
- 38) Daftar Perjalanan Dinas
- 39) List Perjalanan Dinas

C. Pemantauan Kemajuan Proyek

- 1) MK3LL Proyek atau MR melaksanakan Pengendalian
Pemantauan Resiko Memastikan Para Pelaksana dan Subcon
menjalankan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan IK (tidak ada)
- 2) Monitoring Progress Kemajuan Proyek dalam ASMOP (tidak ada)
- 3) Pengendali MK3LL Memantau Resiko (tidak ada)

D. Pembuatan Laporan Hasil Kerja

- 1) Laporan Tahap 1 (tidak ada)
- 2) Laporan Tahap 2 (tidak ada)
- 3) Laporan Tahap 3 (tidak ada)
- 4) Laporan Tahap 4 ((tidak ada)

E. Penyerahan Laporan dan Berita Acara Serah Terima

- 1) BAP P Tahap 1 No. BAPP-053/SIMAK-XII/TY/2019 Tanggal 13
Desember 2019
- 2) BAP P Tahap 2 No. BAPP-002/SIMAK-IirTY/2020 Tanggal 21
Februari 2020
- 3) BAPP Tahap 3 No. BAPP-019/SIMAK-III/TY/2020 Tanggal 20
Maret 2020
- 4) BAPP Tahap 4 No. BAPP-013/SIMAK-V/TY/2020 Tanggal 28 Mei
2020

F. Pembuatan Invoice

- 1) Admin Membuat PPI sesuai dengan Prosedur Keuangan (P-DKA-
04)

Halaman 82 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS



- a. PPI dan Invoice Tahap 1, Surat Permohonan Pembayaran Termin I No.SRT-059/SIMAK-XII/TY/2019 Tanggal 17 Desember 2019 dan Invoice Tahap 1 No. INV-0213/MK-12/TY/19 Tanggal 17 Desember 2019
- b. PPI dan Invoice Tahap 2, Surat Permohonan Pembayaran Termin II No.SRT-030/SIMAK-II/TY/2020 Tanggal 25 Februari 2020 dan Invoice Tahap II No. INV-0029/MK-02/TY/20 Tanggal 25 Februari 2020
- c. PPI dan Invoice Tahap 3, Surat Permohonan Pembayaran Termin III No.SRT-082/SIMAK-XI/TY/2020 Tanggal 30 November 2020 dan Invoice Tahap III No. INV-0244/MK-11/TY/20 Tanggal 30 November 2020
- d. PPI dan Invoice Tahap 4, Surat Permohonan Pembayaran Termin IV No. SRT-083/SIMAK-XI/TY/2020 Tanggal 30 November 2020 dan Invoice Tahap IV No. INV-0245/MK-11/TY/20 Tanggal 30 November 2020
- e. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1 - 1 No. SRT-044/SIMAK-III/TY/2020 Tanggal 12 Maret 2020
- f. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1 - 2 No. SRT-015/SIMAK-VI /TY/2020 Tanggal 03 Juni 2020
- g. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 2 - 1 No. SRT-014/SIMAK-VI/TY/2020 Tanggal 03 Juni 2020
- h. Konfirmasi Pembayaran Cahaya Sakti No. 25-CSA/II/2020 Tanggal 30 Juni 2020
- i. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 2 - 2 No. SRT-029/SIMAK-VIII/TY/2020 Tanggal 26 Agustus 2020
- j. Kesanggupan bayar Cahaya Sakti No. 016/ADM-SKP/ CS/ XII/2020 Tanggal 07 Desember 2020
- k. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 3 - 1 No. SRT-060/SIMAK-III/TY/2021 Tanggal 31 Maret 2021
- l. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 4 - 1 No. SRT-061/SIMAK-III/TY/2021 Tanggal 31 Maret 2021
- m. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 3 - 2 No. SRT-048/SIMAK-IV/TY/2021 Tanggal 26 April 2021
- n. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 4 -2 No. SRT-049/SIMAK-IV/TY/2021 Tanggal 26 April 2021

Halaman 83 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o. Surat Teguran Piutang Invoice Tahap 1 No. SRT-053/SIMAK-IV/TY/2021 Tanggal 26 April 2021
- p. Surat Teguran Piutang Invoice Tahap 2 No. SRT-054/SIMAK-IV/TY/2021 Tanggal 26 April 2021
- q. Undangan Rapat PT Cahaya Sakti - Penjelasan Pembayaran No. SRT-041 /SIMAK-VII I/TY/2021 Tanggal 23 Agustus 2021
- r. Surat pemberitahuan reschedule rapat No. 032/ SPI/ CSA/II/2021 Tanggal 27 Agustus 2021

G. Pengakhiran Proyek

Dokumen dari PT. INOVASI GLOBAL (WILAYAH MAKASSAR)

7. Prosedur Perolehan Proyek P-PROYEK-01

A. Penerimaan Info Potensi Proyek

- 1) Surat Permintaan Penawaran dari PT IGS Makassar (BOQ, RKS dan Surat Undangan) No. 002/IGS.SK-SP/IGS/19-VI Tanggal 18 November 2019

B. Proses Tender

- 1) Surat Balasan Penawaran (PTSI) No. PH-004/SIMAK-XI/TY/2019

C. Proses Kontrak

- 1) SPK Kontrak Final Tanda tangan No. 001/IGS.SK-K.SPK/19-XI

8. Prosedur Persiapan Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-02

A. Pembuatan dan Persetujuan Rencana Anggaran dan Biaya Proyek (RAB Proyek)

- 1) RAB

B. Penyiapan Sumber Daya Manusia

- 1) Form CV

9. Prosedur Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-03

A. Pendanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan

- 1) Uang Muka Operasional, Pengajuan dan PJUM
- 2) List Pengajuan Uang Muka
- 3) Penggajian Personil
- 4) List Penggajian Personil

B. Penyerahan Laporan dan Berita Acara Serah Terima

- 1) BAPP Tanggal 30 Januari 2020

C. Pembuatan Invoice



- 1) Admin Membuat PPI sesuai dengan Prosedur Keuangan (P-DKA-04) - PPI dan Invoice No. SRT-23/SIMAK-III/TY/2020 Tanggal 19 Maret 2020

Dokumen dari PT. INOVASI GLOBAL (WILAYAH JAKARTA)

10. Prosedur Perolehan Proyek P-PROYEK-01

A. Penerimaan Info Potensi Proyek

- 1) Surat Permintaan Penawaran dari PT Inovasi Global Solusindo No. 004/IGS.SK-SP/IGS/19-III Tanggal 12 Maret 2019 (Scan)
- 2) Form FP-Proyek01-01 Kajian Resiko Tahap Pemasaran Tanggal 24 April 2019

B. Pertimbangan Menggunakan Mitra Bisnis

- 1) Form FP-Proyek01-02 Kajian Mitra Bisnis Tanggal 26 Maret 2019

C. Proses Tender

- 1) Form FP-Proyek01-03 Form Pemeriksaan Tender Tanggal 25 April 2019
- 2) Surat Balasan Permintaan Penawaran (PTSI) No. SRT-091/SIMAK-III/TY/2019 Tanggal 21 Maret 2019
- 3) Surat Balasan Permintaan Penawaran (PTIGS) Negosiasi No. 004/IGS.SK-SP.01/IGS/19-III Tanggal 22 Maret 2019
- 4) Surat Konfirmasi Negosiasi (PTSI) No. SRT-108/SIMAK-III/TY/2019 Tanggal 26 Maret 2019

D. Proses Kontrak

- 1) Hasil Legal Review Draft Kontrak No. MEM- 073 /SP-IV/MOD/2019 Tanggal 23 April 2019
- 2) Surat Balasan Penawaran No. 004/IGS-SK-SP.02/IGS/19-111 tanggal 27 Maret 2019
- 3) Form FP-Proyek01-04 Pemeriksaan isi Kontrak Tanggal 24 April 2019
- 4) SPK Kontrak Final Tanda tangan No. 003/IGS.SK-SP.02/IGS/19-III

11. Prosedur Persiapan Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-02

A. Pembentukan Tim/Penanggungjawab Proyek

- 1) Proyek FP-Proyek02-01 Surat Penunjukan Tim Tanggal 24 April 2019

Halaman 85 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Proyek FP-Proyek02-02 Kriteria Tinjauan Ulang Kontrak 24 April 2019

B. Kajian Resiko Proyek & K3LL

- 1) Proyek FP-Proyek02-03 Formulir Monitoring Mutu & K3LL 25 April 2019

C. Pembuatan dan Persetujuan Rencana Anggaran dan Biaya Proyek (RAB Proyek)

- 1) Pembuatan Draft RAB Proyek dan Permohonan Persetujuan RAB Tanggal 26 April 2019 No. MEM-012/SIMAK-IV/TY/2019
- 2) Persetujuan Penandatanganan RAB Proyek Tanggal 16 Mei 2019

D. Penyiapan Sumber Daya Manusia

- 1) Kontrak Personil Proyek

12. Prosedur Pelaksanaan Proyek P-PROYEK-03

A. Pendanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan

- 1) Untuk Pendanaan Proyek mengikuti kebijakan dan Prosedur Anggaran (P-DKA-01) dari DKA
- a. Permohonan Dropping Mei 2019 No. MEM-009/SIMAK-V/ TY/ 2019 Tanggal 15 Mei 2019
- b. Permohonan Dropping Khusus No. ND-046/SIMAK-V/ TY/ 2019 Tanggal 15 Mei 2019
- c. Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh cabang Makassar No. MEM-004. SBINFRAS. V. HW. 2019 Rekomendasi Dropping 16 Mei 2019
- d. Permohonan Dropping Juni 2019 MEM-005.SIMAK-VI. TY. 2019 Permohonan Dropping 25 Juni 2019
- e. Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar MEM-006.SBINFRAS.VI.HW.2019 Rekomendasi Dropping 28 Juni 2019
- f. Permohonan Dropping Juli 2019 No. MEM-012.SIMAK-VII. TY.2019 Permohonan Dropping 23 Juli 2019
- g. Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar MEM-007.SBINFRAS.VII.HW.2019 Rekomendasi Dropping 23 Juli 2019



- h. Permohonan Dropping Agustus 2019 No. MEM-014.SIMAK-VIII.TY.2019 Permohonan Dropping 20 Agustus 2019
- i. Permohonan Dropping Agustus 2019 MEM-014.SBINFRAS.VIII.HU.2019 Rekomendasi Dropping 23 Agustus 2019
- j. Permohonan Dropping September 2019 MEM-008.SIMAK-IX. TY.201 Permohonan Dropping 20 September 2019
- k. Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar MEM-014.SBINFRAS.IX.HW.2019 Rekomendasi Dropping 23 September 2019
- l. Permohonan Dropping Oktober 2019 No. MEM-009.SIMAK-X.TY.2019 Permohonan Dropping 21 Oktober 2019
- m. Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No. MEM-010.SBINFRAS.X.HW.2019 Rekomendasi Dropping 24 Oktober 2019
- n. Permohonan Dropping Desember 2019 MEM-016.SIMAK-XII.TY.2019 Permohonan Dropping 12 Desember 2019
- o. Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar No.MEM-004.SBINFRAS.XII.HU.2019 Rekomendasi Dropping 19 Desember 2019
- p. Permohonan Dropping Januari 2020 eOffice-MEM-094.SIMAK-I.TY.2020 Permohonan Dropping 22 Januari 2020
- q. Rekomendasi atas Permohonan Dropping Dana Oleh Cabang Makassar MEM-263.SBINFRAS-I.HW.2020 Rekomendasi Dropping 27 Januari 2020.
- r. Uang Muka Operasional, Pengajuan dan PJUM
- s. List Pengajuan Uang Muka
- t. Penggajian Personil dan Uang Makan
- u. List Penggajian Personil
- v. Daftar Penyewaan kendaraan
- w. Daftar Pengajuan Perjalanan Dinas

B. Penyerahan Laporan dan Berita Acara Serah Terima

- 1) BAPP Tahap 1 No. BAPP.018/SIMAK-VI/TY/2019 Tanggal 26 Juni 2019
- 2) BAPP Tahap 2 No. BAPP.018/SIMAK-VI/TY/2019 Tanggal 26 Juni 2019

Halaman 87 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) BAPP Tahap 3 No. BAPP.087/SIMAK-IX/TY/2019 Tanggal 30 September 2019

C. Pembuatan Invoice

- 1) Admin Membuat PPI sesuai dengan Prosedur Keuangan (P-DKA-04)
 - a. Surat permohonan pembayaran termin 1 No. SRT-003/SIMAK-VIII/TY/2019 Tanggal 05 Agustus 2019 dan PPI dan Invoice Tahap 1 No. INV-0091/MK-08/TY/19 Tanggal 02 Agustus 2019
 - b. Surat permohonan pembayaran termin 2 No. SRT-027/SIMAK-X/TY/2019 Tanggal 09 Oktober 2019 dan PPI dan Invoice Tahap 2 No. INV-0131/MK-10-TY/19 Tanggal 07 Oktober 2019
 - c. Surat permohonan pembayaran termin 3 No. SRT-033/SIMAK IV/TY/2020 Tanggal 30 April 2020 dan PPI dan Invoice Tahap 3 No. INV-0078/MK-04-TY/20 Tanggal 30 April 2020
 - d. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1-1 No. SRT-036/SIMAK-IX/TY/2019 Tanggal 24 September 2019
 - e. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 1-2 No. SRT-037/SIMAK-I/TY/2019 Tanggal 31 Januari 2020
 - f. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 2-1 No. SRT-067/SIMAK-I/TY/2020 Tanggal 31 Januari 2020
 - g. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 2-2 No. SRT-016/SIMAK-VI/TY/2020 Tanggal 03 Juni 2020
 - h. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 3-1 No. SRT-096/SIMAK-VIII/TY/2020 Tanggal 26 Agustus 2020
 - i. Surat Teguran Invoice Tahap 1 SRT-040/SIMAK-IX/ TY/ 2020 Tanggal 15 September 2020
 - j. Surat Teguran Invoice Tahap 2 SRT-041/SIMAK-IX/ TY/ 2020 Tanggal 25 September 2020
 - k. Surat Konfirmasi Semua Piutang SRT-080/SIMAK-XII/ TY/ 2020 Tanggal 22 Desember 2020
 - l. Konfirmasi Piutang Invoice Tahap 3 - 2 No. SRT-067/SIMAK-III/TY/2021 Tanggal 31 Maret 2021
 - m. Surat Teguran Invoice Tahap 3 No. SRT-051/SIMAK-IV/TY/2021 Tanggal 26 April 2021

Halaman 88 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Kartu ATM Tenaga Operasional Proyek Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin pembangkit Listrik Tenaga Gas PLTG 4 X 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara PT Cahaya Sakti, sebagai berikut:

- 1) ATM an. Bella Regita Nomor: 5221 8421 2193 7111.
- 2) ATM an. Ikram Hadi M Nomor: 5221 8421 2240 4087.
- 3) ATM an. A. Nurfibriani Nomor: 5221 8421 2193 7483.
- 4) ATM an. A. Ilham Nomor: 5221 8421 2240 4210.
- 5) ATM an. Rahmatiah Danah Nomor: 5221 8421 2193 7129.
- 6) ATM an. Ryo Ayatullah Nomor: 5221 8421 2193 7517.
- 7) ATM an. Wahyu Saputra Nomor: 5221 8421 2193 7491.
- 8) ATM an. Abd. Rahman Nomor: 5221 8421 0976 6532.
- 9) ATM an. Irwan Nomor: 5221 8421 2240 4061.
- 10) ATM an. Ryan Santoso Nomor: 5221 8421 2193 7426.
- 11) ATM an. M. Sucitra A Nomor: 5221 8421 2193 7418.
- 12) ATM an. Pangeran S Nomor: 5221 8421 2193 7103.
- 13) ATM an. Nadiah W Nomor: 5221 8421 2193 7137.
- 14) ATM an. M. Resky S Nomor: 5221 8421 2193 7467.
- 15) ATM an. Andi Babara Nomor: 5221 8421 2193 7459.
- 16) ATM an. Warsa H Nomor: 5221 8421 2240 4079.
- 17) ATM an. Sri Rahayu Nomor: 5221 8421 2240 4053.
- 18) ATM an. Dwi Rachma A Nomor: 5221 8421 2193 7350.
- 19) ATM an. Abd. Rahman Nomor: 5221 8421 2193 7434.
- 20) ATM an. Agung Januar Nomor: 5221 8421 2193 7525.
- 21) ATM an. Rahmat Wardana Nomor: 5221 8421 0988 9615.
- 22) ATM an. Ahmad Erwin Nomor: 5221 8421 2193 7442.
- 23) ATM an. Dwi Hartini Nomor: 5221 8421 2193 7509.
- 24) ATM an. Nasrul R N Nomor: 5221 8421 2240 4046.
- 25) Rekening Koran Bank BCA an. Agus Ibrahim Nomor Rekening: 5040187253 Bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, , Agustus, September, Oktober, November, Desember 2019, Januari, Februari, Maret 2020.
- 26) Rekening Koran Bank BRI an. Yuni Omega Tanga Nomor Rekening : 341901012162503 Bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2021, Januari, Februari, Maret 2022.

Halaman 89 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 27) Rekening Koran Bank BRI an. Yuni Omega Tanga Nomor Rekening :040301067206508 Bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2021, Januari, Februari, Maret 2022.
- 28) Rekening Koran Bank an. Edy Darmawan Nomor Rekening 040301008981535 Bulan Oktober, November, Desember 2019, Januari, Februari, Maret 2020.
- 29) Rekening Koran Bank Danamon Indonesia an. Try Yulianto Nomor Rekening : 00362553685 Bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2020, Tahun 2021, Januari, Februari, Maret 2022.
- 30) Rekening Koran Bank Mandiri an. Tri Yulianto Nomor Rekening: 1420002293214 Bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2019, Tahun 2020, Tahun 2021.
- 31) Rekening Koran Bank BRI an. Pedi Fadillah Nomor Rekening: 039001012943500, Bulan September, Oktober, November, Desember 2020, Januari, Februari, Maret 2021.
- 32) Rekening Koran Bank Mandiri an. Pedi Fadillah Nomor Rekening :700041019709 Bulan September, Oktober, November, Desember 2020, Januari, Februari, Maret 2021.
- 33) Rekening Koran Bank BCA an. Achmad Tauhid Latif Nomor Rekening: 7890625082 Bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2021.
- 34) Rekening Koran Bank BRI an. Achmad Tauhid Latif Nomor Rekening: 034301045169504 Bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, Januari, Februari, Maret 2022.
- 35) Rekening Koran Bank BCA an. Achmad Tauhid Latif Nomor Rekening : 7890625082 Bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2019, Tahun 2020, Tahun 2021.
14. Capture Email dan Wa PT. Basista Teamwork.
15. Capture Email dan Wa PT. Cahaya Sakti.
16. Capture Email dan WA PT. Inovasi Global Solusindo.
17. 1 lembar cek kosong dari Tri Yulianto kepada Hermawati dari PT Cahaya Sakti untuk pembayaran jasa terkait Proyek Pekerjaan Jasa

Halaman 90 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konsultasi penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi Serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Listrik Tenaga Gas PLTG 4 X 7.8 MW Tarakan, Kalimantan Utara PT Cahaya Sakti.

18. Surat Keputusan Direksi PT Surveyor Indonesia SKD-008/DRU-VII/DSDM/2018 tanggal 26 Juli 2018 tentang Mutasi dan Promosi Saudara Tri Yulianto.
19. Akta Notaris Nomor 11 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Pencabutan dan Pengangkatan Pimpinan Serta Tugas, Wewenang dan Kuasa Kepala Cabang Madya Makassar.
20. Surat Keputusan Direksi PT Surveyor Indonesia (Persero) Nomor: SKD-003/DRU-IV/DHC/2020 tanggal 28 april 2020 tentang Definitif Saudara TriYulianto.
21. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Surveyor Indonesia (Persero) Nomor :029 tanggal 28 Juni 2011.
22. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Pernyataan atas nama Tri Yulianto tanggal 8 April 2022.
23. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Pernyataan atas nama Asmara Hady tanggal 8 April 2022.
24. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Pernyataan atas nama Achmad Tauhid Latieftanggal 8 April 2022.
25. 1 (satu) Lembar daftar Dropping dana proyek PT. Basista Teamwork.
26. 1 (satu) lembar Daftar Dropping dana proyek PT.Cahaya Sakti.
27. 1 (satu) lembar daftar Dropping dana proyek PT. Inovasi Global olusindo Makassar.
28. 1 (satu) lembar daftar dropping dana proyek PT. Inovasi Global Solusindo Jakarta.
PT. Basista Teamwork

(Disita dari Agung Pambudi)

29. Rekening Koran Bank BCA an. Agung Pambudi Nomor Rekening : 8803999994 Tahun 2019.
30. Rekening Koran Bank BCA an. Agung Pambudi Nomor Rekening: 8803999994 Tahun 2020.
31. Rekening Koran Bank BCA an. Agung Pambudi Nomor Rekening: 8803999994 Tahun 2021.



32. Rekening koran Bank BRI an. Inovasi Global Solusindo Nomor Rekening :117301000251304 bulan November dan Desember Tahun 2019.

33. Rekening koran Bank BRI an. Inovasi Global Solusindo Nomor Rekening :117301000251304 Tahun 2020.

34. Rekening koran Bank BRI an. Inovasi Global Solusindo Nomor Rekening :117301000251304 Tahun 2021.

(Disita dari Bhascara Rachmanto Sarasin)

35. Rekening koran Bank BRI an. Bhascara Rachmanto S. Nomor Rekening :42701023591503 bulan Oktober, November dan Desember 2019.

36. Rekening koran Bank BRI an. Bhascara Rachmanto S. Nomor Rekening :42701023591503 Tahun 2020.

37. Rekening koran Bank BRI an. Bhascara Rachmanto S. Nomor Rekening :42701023591503 bulan Januari, Februari, Maret dan April 2021.

(Disita dari Hermawati)

38. Keputusan Direksi PT Surveyor Indonesia Nomor SKD-024/DRU-VIII/DHC /2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Saudara Achmad Tauhid Latief Sebagai Pegawai Tetap Perusahaan.

39. Surat Nomor : SPK-029/PKWTT/DHC-VIII/DN/2019 tanggal 01 Agustus 2019 perihal Surat Penawaran Kerja.

40. 1 lembar Memorandum Nomor : MEM-090/DHC-VIII/DN/2019 tanggal 20 Agustus 2019 perihal Surat Keputusan Direksi.

41. Surat Tugas Nomor : SRT-033/SIMAK-X/TY/2019 perihal menugaskan secara penuh kepada Achmad Tauhid Latief sebagai Proyek Manager Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi serta Pendampingan dan Monitoring Pengadaan Lahan PT Basista Teamwork.

42. Surat Tugas Nomor : SRT-026A/SIMAK-VIII/TY/2019 perihal menugaskan secara penuh kepada Achmad Tauhid Latief sebagai Proyek Manager Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Teknis dan Administrasi serta Pendampingan Permohonan Pembaharuan Ijin Pembangkit Listrik Tenaga Gas PLTM 4 x 7.8 MW Tarakan, Kalimantan.

43. Surat Tugas Nomor : SRT-007A/SIMAK-IV/TY/2019 perihal menugaska secara penuh kepada Achmad Tauhid Latief sebagai

Halaman 92 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Proyek Manager Pekerjaan Jasa Pengawasan dan Jaringan Utilities FO di Jakarta.

44. Surat Tugas Nomor: SRT-048/SIMAK-XI/TY/2019 perihal menugaskan secara penuh kepada Edy Darman Tenri Sau sebagai Proyek Manager Pekerjaan Jasa Pendampingan dan Pengawasan Kabel Udara Fiber Optic.
45. Surat Nomor : SRT-030/SIMAK-VIII/TY/2019 tanggal 13 Agustus 2019 perihal Surat Penawaran kerja kepada Sdr.Edy Darman Tenri Sau.
46. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu Nomor : PERJ155/ SIMAK/ TYA/ 111/2019 perihal Perjanjian Kerja antara Tri Yulianto sebagai pihak pertama dan Edy Darman Tenri Sau sebagai pihak kedua.
47. Surat Nomor : SPK-189/SIMAK-IX/HSY/2023 tanggal 12 September 2023 perihal Surat Penawaran Kerja kepada Sdr. Edy Darman tenri Sau.
48. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu Nomor : PERJ-247/SIMAK/ HSY/ IX/2023 perihal Perjanjian Kerja antara Helmy Satria Yudha sebagai pihak pertama dan Edy Darman Tenri Sau sebagai pihak kedua.
49. Keputusan Direksi PT. Surveyor Indonesia (PERSERO) Nomor : SKD-152/DRU-XI/DHC/2021 tanggal 11 November 2021 tentang Alih Jabatan Saudara Asmara Hady
50. Keputusan Direksi PT. Surveyor Indonesia (Persero) Nomor : SKD-004/DRU-VII/DHC/2020 tanggal 24 Juli 2020 tentang Promosi Saudara Asmara Hady
51. Surat Tugas Nomor : SRT-001/SIMAK-I/TY/2019 perihal menugaskan secara penuh kepada Asmara Hadi sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Bagian Komersial 2 di Cabang Makassar.

(Disita dari Indra Gumilar Prasetya)

52. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penawaran Kerjasama Pekerjaan Penyewaan Alat Survey Topografi dan Boring No. 005/22/VI/SPH/2019 tanggal 22 Mei 2019 senilai Rp.96.500.000,-.
53. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penawaran Kerjasama Pekerjaan Penyewaan Alat Survey Topografi dan Boring No. 004/22/VI/ SPH/ 2019 tanggal 22 Mei 2019 senilai Rp.120.000.000,-.
54. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penawaran Kerjasama Pekerjaan Penyewaan Alat Survey Topografi dan Boring No. 003/22/VI/SPH/ 2019 tanggal 22 Mei 2019 senilai Rp.99.200.000,-.

Halaman 93 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penawaran Kerjasama Pekerjaan Penyewaan Alat Survey Topografi dan Boring No. 002/22/V/A/SPH/ 2019 tanggal 22 Mei 2019 senilai Rp.100.500.000,-.
56. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penawaran Kerjasama Pekerjaan Penyewaan Alat Survey Topografi dan Boring No. 001/22/V/A/SPH/ 2019 tanggal 22 Mei 2019 senilai Rp.105.000.000,-.
57. 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice No.: INV.05.05/IGP/SI-MKS/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp.79.375.000,-
58. 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice No.: INV.01.05/IGP/SI-MKS/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp.97.500.000,-
59. 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice No : INV.04.05/IGP/SI-MKS/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp. 98.700.000,-
60. 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice No : INV.03.05/IGP/SI-MKS/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp. 79.500.000,-
61. 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice No : INV.02.05/IGP/SI-MKS/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp. 84.000.000,-
62. 1 (satu) rangkap Rekening Tahapan BCA periode Mei 2019 Nomor Rekening 4491399451 an. Indra Gumilar Prasetya.
63. 1 (satu) rangkap Rekening Tahapan BCA periode Juli 2019 Nomor Rekening 4491399451 an. Indra Gumilar Prasetya.
64. 1 (satu) rangkap Bukti Slip Setoran BCA senilai Rp. 245.687.000,-
(Disita dari M. Rijal)
65. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019 nomor polisi: B 1657 FZM warna hitam metalik tanggal 18 Oktober 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
66. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019 nomor polisi: B 1646 FIM warna hitam metalik tanggal 18 Oktober 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
67. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 nomor polisi : B 2957 SZU warna hitam metalik tanggal 18 November 2019 senilai Rp.15.000.000,-.

Halaman 94 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 nomor polisi : B 1646 FIM warna hitam metalik tanggal 18 November 2019 senilai Rp.15.000.000,-
69. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 nomor polisi : B 2496 KFJ warna putih tanggal 18 November 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
70. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 nomor polisi : KT 1741 ZW warna abu-abu metalik tanggal 18 November 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
71. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 nomor polisi : KT 1766 K warna abu-abu metalik tanggal 18 November 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
72. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 nomor polisi : B 1657 FZM warna hitam metalik tanggal 18 November 2019 senilai Rp.15.000.000,-.
73. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 nomor polisi : KT 1741 ZW warna abu-abu metalik tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
74. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Desember 2019



- sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 nomor polisi : B 2496 KFJ warna putih tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
75. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 nomor polisi :KT 1766 K warna abu-abu metalik tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
76. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta denganperiode tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 nomor polisi : B 1657 FZM warna hitam metalik tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
77. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 nomor polisi : B 1646 FIM warna hitam metalik tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
78. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 nomor polisi : B 2957 SZU warna putih tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp. 15.000.000,-.
79. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 nomor polisi : KT 1741 ZW warna abu-abu metalik tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
80. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 nomor polisi : KT 1766 K warna abu-abu metalik tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
81. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian



- Jakarta dengan periode tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 nomor polisi : B 2957 SZU warna hitam metalik tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
82. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 nomor polisi : B 1657 FZM warna hitam metalik tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
83. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 nomor polisi : B 1646 FIM warna hitam metalik tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
84. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 nomor polisi : B 1657 FZM warna hitam metalik tanggal 17 Maret 2020 senilai Rp.15.000.000,-.
85. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 nomor polisi : B 2957 SZU warna hitam metalik tanggal 17 Maret 2020 senilai Rp.15.000.000,-.
86. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 nomor polisi : B 1646 FIM warna hitam metalik tanggal 17 Maret 2020 senilai Rp.15.000.000,-.
87. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 nomor polisi : KT 1766 K warna abu-abu metalik tanggal 17 Maret 2020 senilai Rp.15.000.000,-.
88. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Maret 2020



- sampai dengan tanggal 15 April 2020 nomor polisi : B 2496 KFJ warna putih tanggal 17 Maret 2020 senilai Rp.15.000.000,-.
89. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 nomor polisi : KT 1741 ZW warna abu-abu metalik tanggal 17 Maret 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
90. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 nomor polisi: B 2957 SZU warna hitam metalik tanggal 17 Mei 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
91. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 nomor polisi B 1657 FZM warna hitam metalik tanggal 17 Mei 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
92. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 nomor polisi: B 1646 FIM warna hitam metalik tanggal 17 Mei 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
93. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Tarakan Kalimantan Utara dengan periode tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 nomor polisi: KT 1741 ZW warna abu-abu metalik tanggal 17 Mei 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
94. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020 nomor polisi: B 2496 KFJ warna putih tanggal 17 Juni 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.
95. 1 lembar invoice tentang pembayaran sewa kendaraan Toyota Innova Reborn selama satu bulan dengan sopir dengan wilayah pemakaian Jakarta dengan periode tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020 nomor polisi: B 2957 SZU warna hitam metalik tanggal 17 Juni 2020 senilai Rp. 15.000.000,-.



96. 4 lembar Screenshoot bukti transfer.

(Disita dari M. Ridho Umbaran)

97. 1 bundel dokumen Permohonan Pengembalian Dana Nomor 085/Law/MHM/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Pengembalian Dana.

98. 1 lembar cek BNI untuk Nomor Rekening : 0101466749 an. BasistaTeamwork sejumlah Rp. 325.000.000,- tanggal 30 September 2020.

99. 1 lembar cek BRI Sejumlah Rp. 210.000.000,- tanggal 24 Juli 2020

100. Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 26 Oktober 2020 (Bank BNI).

101. 1 lembar Kwitansi dari M. Ridho Umbaran sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran biasa pengurusan administrasi pengajuan kredit ke Bank Swasta atas nama PT. Cahaya Sakti.

102. 1 lembar invoice tanggal 13 Juli 2020 kuitansi nomor : A004-CS (telah diterima oleh PT. Cahaya Sakti dari Bp. M. Ridho Umbaran.

103. Rekening koran Bank Bri an. Titin Dwi Tyasti Nomor Rekening 324801016125536 bulan Juli, September, November dan Desember 2019, Tahun 2020.

104. Rekening Koran Bank BRI an. M. Ridho Umbaran Nomor Rekening : 120901002802500 bulan Desember 2019, Tahun 2020, dan Januari 2021.

Dikembalikan kepada PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar.

(Disita dari Agus Ibrahim)

105. Uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Agung Pambudi.

(Disita dari Dian Vita Juliastanti)

106. Uang tunai sebesar Rp. 12.835.500,- (dua belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Agung Pambudi.

(Disita dari Jhonson Lumbatoruan)

107. Uang tunai sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Agung Pambudi dan Terdakwa I Fachrul Madin.

Halaman 99 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS



(Disita dari M.Rijal)

108. Uang tunai sebesar Rp. 17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa I Fachrul Madin.

(Disita dari Padi Fadillah)

109. Uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa I Fachrul Madin.

(Disita dari Jasi Ekarini)

110. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 269 atas nama Tri Yulianto.

Dirampas oleh negara Cq. PT. Surveyor Indonesia dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Tri Yulianto.

(Disita dari Yuanito Bayu Ardi Sasongko)

111. Rekening koran Bank BRI an. Nur Multazam Nurdin Nomor Rekening:040301031999507 bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2020, Tahun 2021, bulan Januari, Februari, dan Maret tahun 2022.

112. Rekening koran Bank BRI an. Asmara Hady Nomor Rekening 448001010041533 bulan September, Oktober, November, Desember Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, bulan Januari, Februari dan Maret tahun 2022.

113. Rekening koran Bank BCA an. Asmara Hady Nomor Rekening : 2900269709 bulan Juli, September, Oktober, November, Desember 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, bulan Januari dan Februari 2022.

114. Rekening koran Bank Mandiri an. Asmara Hady Nomor Rekening : 1490003036573 bulan September tahun 2021.

115. Rekening koran Bank BRI an. Leopold Indra AL Nomor Rekening : 040301047712503 bulan Oktober, November, Desember tahun 2020, Tahun 2021, bulan Januari, Februari, dan Maret tahun 2022.

116. Rekening koran Bank BRI an. Leopold Indra AL Nomor Rekening : 729001000336530 bulan Oktober, November, Desember, Tahun 2021, bulan Januari, Februari, Maret tahun 2022.

117. Rekening koran Bank BRI an. A. Gita Gandrika Muc Nomor Rekening: 358201036884536 bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September,

Halaman 100 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID.TPK/2024/PT MKS



Oktober, November, Desember tahun 2019, Tahun 2021, Tahun 2021, bulan Januari, Februari, Maret 2022.

Dikembalikan kepada PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar.

(Disita dari Indra Gumilar Prasetya)

118. Uang tunai sebesar Rp. 9.766.000,- (sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Agung Pambudi.

(Disita dari Zulkifli)

119. Uang tunai sebesar Rp. 70.600.000,- (tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah).

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ifachrul Madin.

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh kami, Titus Tandi, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, Eko Karyadi, S.H., M.H., dan Mochamad Ilyas, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Hj. Sumarni Usman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

t.t.d.

Eko Karyadi, S.H., M.H.

t.t.d.

Mochamad Ilyas, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

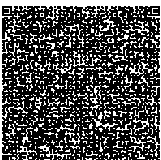
t.t.d.

Titus Tandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Hj. Sumarni Usman, S.H., M.



Pengadilan Tinggi Makassar

Panitera Tingkat Banding

Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196003171991031001

Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.

- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 101 dari 101 Halaman Putusan Nomor 51/PID. PK/2024/PTMKS

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13

Telp. (021) 384 3348 - 384 3349 / 384 3350 - 384 3351

Email : info@mahkamahagung.go.id

www.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 101